PARTISIPASI ELIT POLITIK PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO

(Studi Kasus Keterlibatan Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto Dalam Pemilu Tahun 2009)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dalam Politik Islam

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K 4-2010 013 P1
No. REG : 4-2010/P1/013
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

TRI AINUR ROMZAH
NIM. E04206014

PRODI POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Tri Ainur Romzah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2010
Pembimbing,

Dra. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang disusun oleh Tri Ainur Romzah ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi

Surabaya, 09 Agustus 2010

Mengesahkan,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin
Dekan,

DR. H. Ma'shum, M.Ag
NIP. 196009141989031001

Majelis Munaqasah Skripsi:
Ketua,

Dra. Aniek Nurhayati,M.Si
NIP. 196909071994032001

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

Penguji I,

Andi Suwarko, M.Si
NIP. 197411102003121004

Penguji II,

Khoirul Yahya, S.Ag, M. Si
NIP. 197202062007101003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Partisipasi Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus keterlibatan Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam pemilu Tahun 2009)**

Pembimbing : **Dra. Aniek Nurhayati, M. Si**

Penulis : **Tri Ainur Romzah**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto. Apa motif partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto dan untuk mendeskripsikan motif-motif partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu. Sedangkan pengambilan data dilakukan kepada informan yang berasal dari kalangan partai politik, panitia penyelenggara pemilu (KPU) dan kontestan pemilu tahun 2009 dengan menggunakan metode wawancara.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto ditunjukkan dalam bentuk memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, aktif dalam diskusi informal, menjadi pengurus partai, menjadi saksi dalam pemilu, dan menjadi panitia penyelenggara pemilu (KPU). Partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto dalam pemilu tahun 2009 tidak dapat dilepaskan dari adanya motif yang mendorong elit politik perempuan dalam berpartisipasi. Adapun motif antara lain dipengaruh oleh adanya keyakinan dalam diri individu, orientasi pemimpin dan agama, dan juga karena adanya kesadaran warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk turut memberikan kontribusi bagi perkembangan bangsa.

Kesimpulan hasil penelitian bahwa partisipasi elit politik perempuan terbagi kedalam tiga bentuk yakni sebagai pengamat, partisipan, dan aktivis. Partisipasi elit politik perempuan sebagai pengamat ditunjukkan dalam bentuk memberikan suara. Elit politik perempuan sebagai partisipan adalah dengan ikut serta dalam diskusi informal, sebagai peserta atau juru kampanye, menjadi saksi dalam pemilu, dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sedangkan elit politik perempuan sebagai aktivis menjadi anggota penyelenggara pemilu dan menjadi pengurus partai.

Motif berpartisipasi elit politik perempuan di Kabupaten Mojokerto dalam pemilu tahun 2009 merupakan motif rasional bernilai dan keikutsertaan mereka dengan berpartisipasi atas dasar pertimbangan rasional. Sebagian elit politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan telah menilai secara objektif pilihannya dan sebagian lainnya mengandung motif yang afektual emosional yaitu akibat penilaian terhadap agama serta partai politik yang dipilih merupakan suatu bentuk kristalisasi nilai yang didapatkan dalam lingkungan politiknya.

Berangkat dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran yakni Elit politik perempuan lebih meningkatkan kualitas diri lagi agar dapat melakukan banyak peran terutama peran-peran di wilayah publik yang justru banyak bersinggungan dengan kepentingan perempuan itu sendiri. Elit politik perempuan perlu mengambil bagian secara lebih luas lagi dengan memberikan kontribusi lebih karena statusnya di tengah masyarakat telah diakui sebagai sosok yang mampu dan mempunyai potensi dalam bidang politik khususnya. Para elit politik perempuan bersama-sama dengan pemerintah, organisasi sosial masyarakat, partai politik, dan tokoh-tokoh politik hendaknya dapat bekerjasama dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan agar peningkatan partisipasi politik masyarakat dapat lebih berkualiatas.

Keyword: Partisipasi Politik, Elit Politik Perempuan, Pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR TRANSLITERASI xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Penegasan Judul 11

F. Telaah Pustaka 11

G. Metode Penelitian 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jenis dan pendekatan penelitian 14

b. Subyek penelitian 15

c. Fokus penelitian 15

d. Sumber data 16

e. Tahap-tahap penelitian 18

f. Teknik pengumpulan data 20

g. Teknik analisis data 22

h. Objektivitas dan keabsahan data 25

H. Sistematika Pembahasan 26

BAB II : KERANGKA TEORITIK

A. Partisipasi Politik 27

1. Konsep Partisipasi Politik 27

2. Tipologi Partisipasi Politik 31

3. Faktor Pendorong Partisipasi Politik 38

4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 44

5. Partisipasi Sebagai Akibat dari Sosialisasi 48

B. Elit dalam Bangunan Teori Sosial 51

C. Perempuan dalam Perspektif Politik 55

1. Perspektif Politik Perempuan dalam Gender 55

2. Perspektif Politik Perempuan dalam Islam 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 62

1. Sejarah 62

2. Letak Geografis 63

a. Letak dan batas wilayah 63

b. Topografi 65

3. Demografi 66

4. Aspek Ekonomi 68

5. Aspek Sosial Budaya 74

a. Pendidikan 74

b. Agama 75

c. Kesehatan 76

B. Profil Pemilu Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 81

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 86

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto 86

a. Pemberian suara atau votting 86

b. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 88

c. Kampanye 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menjadi anggota komisi pemilihan umum 95

e. Menjadi saksi dalam pemilu 98

f. Menjadi pengurus partai politik 99

2. Motif Elit Politik Perempuan Berpartisipasi Politik dalam pemilu tahun 2009..... 101

B. Pembahasan Tentang Partisipasi Elit Politik Kabupaten Mojokerto 103

1. Elaborasi bentuk partisipasi elit politik perempuan 103

2. Motif elit politik perempuan berpartisipasi politik 109

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 114

B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan 66

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin 67

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin..... 68

Tabel 4. Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Kabupaten Mojokerto 75

Tabel 5. Tempat Peribadatan Menurut Jenis Rumah Ibadah 76

Tabel 6. Daftar Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu 2009 84

Tabel 7. Calon Anggota legislatif Berdasarkan Partai Politik 89

Table 8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2009-2014 90

Tabel 9. Anggota Legislatif Perempuan terpilih 91

Tabel 10. Daftar Nama Anggota KPU Kabupaten Mojokerto 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini telah disadari bahwa politik merupakan suatu hal yang sangat diprioritaskan, baik dalam tataran pusat maupun semua yang ada di tingkat daerah. Bila kita berbicara masalah politik maka tidak akan terlepas dari apa yang disebut partisipasi politik. Partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi, yang mana menuntut masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan, baik yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[1] Dengan adanya asumsi dasar tersebut diatas, mau tidak mau setiap warga negara harus berperan aktif dalam percaturan perpolitikan daerah.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang *(Developing Country)* berusaha mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan. Di negara berkembang upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor kehidupan masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang di bangun oleh sebuah negara.

---

[1] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan nasional, artinya tanpa adanya partisipasi politik warga negara maka tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi sulit untuk diwujudkan.

Seiring dengan era reformasi yang semakin terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk menikmatinya. Menurut Sanit bahwa anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau berpartisipasi didalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan,[2] dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis dua kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya terlibat dalam proses pembangunan terutama dibidang politik. Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun.

Dalam kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya tidak ada pembedaan atas hak dan kewajibannya, semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Semua hal tersebut tentunya dilaksanakan dengan cara-cara dan mekanisme yang telah diatur oleh sistem pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah

[2] Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu keniscayaan dalam sistem demokrasi menuntut keterlibatan warga negara didalamnya.[3] Adapun aturan main (*rule of game*) dalam sistem demokrasi nasional salah satunya adalah pemilu. Kegiatan pemilu sendiri ditujukan sebagai sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif. Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi politik.

Selama ini politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif, sebagai orang yang tidak dapat diterima atau diinginkan. Dengan ungkapan lain perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal.

Padahal ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresif kreatif. Kekuasaan, sebagai unsur penting dalam membangun dan memimpin seseorang, selalu didefinisikan sebagai kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna

[3] Ibid..., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai sesuatu demi tujuan yang lebih besar. Pada hakekatnya kekuasaan bersifat netral, bisa digunakan untuk kebaikan dan sekaligus untuk kejahatan.[4]

Pada dasarnya perbedaan laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Sementara itu gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis seperti selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat.[5]

Menurut Mansour Fakih dalam buku "*Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*" mengartikan gender sebagai pembagian peran serta tanggungjawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan secara sosial maupun *culturall* (*socially and culturally constructed*). Oleh sebab itu gender bukanlah suatu kodrat ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan, melainkan suatu pembedaan yang disosialisasikan dalam waktu yang lama. Karena dalam kenyataanya ada perempuan yang kasar, kuat, dan rasional. Sementara tidak sedikit laki-laki yang lembut, lemah, dan emosional. Oleh karena itu gender sesungguhnya berkaitan erat dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan

---

[4] Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 3.

[5] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berada. Peran yang menentukan terjadinya pembedaan tersebut adalah terdapat pada aturan masyarakat itu sendiri, bukan pada perbedaan biologis.[6]

Dalam Al-Quran jelas terungkap bahwa kedudukan dan kemuliaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan dinilai bukan dari kekuatan (superioritas) maupun kepintarannya. Tetapi lebih karena ketakwaanya, firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujurat: 13).[7]

Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa Islam itu menghargai harkat, derajat, hak setiap perempuan, tanpa membedakan dengan laki-laki. Perempuan bebas untuk mengembangkan ekonominya dan tidak lagi termarginalkan.[8]

---

[6] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 157-158.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 518.

[8] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit.

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat elit atau pusat tetapi juga berimbas pada tingkat lokal atau daerah. Terlebih lagi bahwa posisi kaum perempuan kurang diuntungkan secara politis karena jarang sekali terlibat dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan perempuan itu sendiri.

Peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengalami kelemahan. Kini gerbang demokrasi telah terbuka dengan lebar dan peluang perempuan untuk turut mengaktualisasikan dirinya juga telah dijamin. Dengan adanya Undang-undang Pemilu Tahun 2008 No. 10 yang mengatur tentang kuota 30% sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak *stagnasi* kuantitas perempuan di wilayah publik. Dimana dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%" [9]

Pemilu tahun 2009 merupakan peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan kita. Untuk kali kedua dalam sejarah nasional pemilihan umum dilakukan secara langsung untuk memilih presiden, wakil presiden dan anggota legislatif. Banyak hal yang membuat kalangan tertarik untuk mengkaji karena permasalahan dalam pemilu bukan hanya permasalahan yang terbatas pada kampanye, pemberian suara, penghitungan suara, konflik massa ataupun gerakan-gerakan protes dari ketidak puasan kontestan pemilu, tapi pemilu merupakan media pendidikan politik bagi warga negara.

Pemilu dilaksanakan serempak di semua daerah dan secara umum tahun 2009 berhasil dengan sukses, namun dibalik kesuksesanya yang besar itu masih meninggalkan permasalahan yang belum dapat dituntaskan. Bukan hanya berada pada tingkat pusat, namun sampai pada wilayah-wilayah lokal.

Di Kabupaten Mojokerto pelaksanaan pemilu berjalan dengan sukses, kesuksesan ini tidak lepas dari peran semua pihak terutama masyarakat sebagai faktor pendukung dan penentu dengan melakukan partisipasi politik didalamnya. Adapun bentuk partisipasi politik masyarakat beraneka ragam, ada yang sebatas memberikan suara namun ada juga yang memilih bentuk partisipasi politik seperti

---

[9] Undang-Undang Pemilu (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti kampanye, menjadi juru kampanye, ataupun menjadi saksi dalam pemilu.

Selama ini yang lebih terlihat aktivitasnya dalam pemilu adalah laki-laki, sementara keberadaan perempuan sepertinya tenggelam dibawah kebesaran nama laki-laki. Kegiatan pemilu kalau dicermati secara detail dimungkinkan perempuan memiliki andil yang besar dalam kesuksesan pemilu di Kabupaten Mojokerto tahun 2009. Peran-peran perempuan tidak sebatas memberikan suara saja, namun juga peran-peran besar seperti yang dilakukan oleh laki-laki.

Pemilu 2009 memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan, ada banyak peran yang dapat dilakukan dalam proses penting kenegaraan tersebut. Bagaimanapun juga perempuan merupakan salah satu *entitas* yang memiliki potensi, kemampuan, dan kelebihan yang tidak kalah dengan laki-laki. Atas dasar kenyataan inilah kemudian peneliti mengambil judul "Partisipasi Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto".

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah, maka peneliti perlu merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah motif partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan motif-motif partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

   Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Politik yakni mengetahui tentang partisipasi elit politik perempuan. Selain itu, penelitian ini bisa sebagai acuan dalam memeperkaya referensi khususnya tentang perempuan dalam sistem politik.

2. Secara praktis

   Sedangkan dalam segi praktis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mampu memberi penjelasan dengan jelas tentang wacana partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto, dan juga dapat bermanfaat bagi peningkatan dan penguatan partisipasi politik perempuan khususnya di tingkat mikro Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan isi skripsi yang berjudul "Partisipasi Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto". Maka penulis perlu menjelaskan arti dari istilah yang ada dalam judul sebagai berikut:

1. Partisipasi politik : Kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi mempunyai kesamaan dengan tindakan politik. Misal, ikut pemilu, mempengaruhi pengambilan keputusan, ikut partai.[10]
2. Elit politik perempuan : Menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi khususnya perempuan yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial sebagai minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab.[11] Di sini yang dimaksud elit politik perempuan, seperti: Pengurus Partai Politik Perempuan, Anggota KPU Perempuan, Anggota Legislatif Perempuan.
3. Pemilu 2009 : Pemilihan yang di selenggarakan untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, periode 2009-2014. Pemungutan diselenggarakan pada 9 April 2009.
4. Mojokerto : Nama salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dan yang menjadi tempat penelitian.

---

[10] Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 222.
[11] Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Telaah Pustaka

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal atau catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi. Diantara buku-buku yang menjadi bahan telaah adalah:

1. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik : Masih Menjadi Kabar Burung,* karya Eko Bambang Subiyantoro, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004. Yang membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam wacana politik, yang sampai detik ini masih menjadi perdebatan.
2. *Keterwakilan Perempuan di Parlemen Dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender,* karya Heriyani Agustina. dkk, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009. Jurnal yang membahas mengenai keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat timpang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan seks (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan gender (konstruksi sosial).
3. *Memahami Ilmu Politik,* karya Ramlan Surbakti, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999. Isi dari buku ini salah satunya yakni membahas mengenai partisipasi politik, di mana disitu dijelaskan pengertian partisipasi politik dan tipologi partisipasi politik yang dikemukakan oleh para ilmuwan dan pakar politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Otonomi Perempuan,* karya Najlah Naqiyah, Bayumedia Publishing, *Malang*, 2005. Buku ini membahas mengenai otonomi perempuan, yang berarti perempuan otonom, independen, dan mandiri dalam segala hal. Dalam buku otonomi perempuan ini juga dibahas persoalan-persoalan otonomi perempuan lewat pendekatan persoalan agama. Dengan pendekatan itu dimaksudkan untuk memerdekakan perempuan dalam mengambil peran publik yang selama ini belum jelas keberadaanya.
5. *Pengantar Sosiologi Politik,* karya Michael Rush dan Philip Althoff, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Dalam buku ini salah satu pointnya menjelaskan tentang konseptualisasi partisipasi politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik.
6. *Peranan Politik Perempuan Dari Pondok Pesantren (Studi Kasus Keterlibatan Perempuan Pesantren Ihyaul Ulum Gresik Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009,* karya Abdullah Ubet, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009. Dalam skripsi ini membahas mengenai dimana perempuan pesantren Ihyaul Ulum Gresik telah ikut andil peran dalam pemilu legislatif tahun 2009 yakni sebagai calon legislatif hingga mampu menghantarkan salah satu dari mereka terpilih sebagai badan anggota legislatif periode 2009-2014.
7. *Perempuan dan Politik Ketika yang Personal Adalah Konstitusional,* karya MB. Wijaksana, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, *2004*. Jurnal ini membahas mengenai gerakan perempuan dan komitmen terhadap demokrasi serta menengok konstitusi di berbagai negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

8. *Politik Perempuan Bukan Gerhana,* karya Ani Widyani Soejtipto, Kompas, Jakarta, 2005. Buku ini memotret tentang peluang penguatan posisi perempuan dalam kanca perpolitikan di Indonesia, buku ini juga menjelaskan mengapa partisipasi perempuan menjadi satu keharusan dan mengapa perlu tindakan *affirmative* untuk perempuan.
9. *Potret Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (Antara Misi dan Kapasitas Personal),* karya Machya Astuti Dewi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009. Membahas mengenai kiprah legislatif perempuan di provinsi DIY, dimana peran perempuan masih sedikit yang berani memberi usulan-usulan atau menyuarakan pendapat mereka dalam sidang-sidang komisi. Para legislatif perempuan di Provinsi DIY Cenderung bersikap pasif.
10. *Status Perempuan Dalam Perspektif Islam (Antara Normatif dan Realitas),* karya Qamarul Huda, AHKAM Jurnal Hukum Islam, LP3M Unit Penerbit STAIN, Tulungagung, 2007. Jurnal ini membahas mengenai kedudukan perempuan dalam pandangan Islam. Dimana Islam menempatkan perbedaan gender dalam konsep pranata sosialnya.

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis diatas, belum ada penelitian yang membahas secara mendalam dengan memfokuskan pada partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto dalam pemilu tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dan motif-motif partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto.

G. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (*paradigma naturalistik*) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[12] Penelitian ini menggunakan pendekatan *analisis deskriptif,* yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan secara mendalam tentang variable tertentu.

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna penulis menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Artinya setelah mengetahui gambaran tentang partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto, kemudian penulis menganalisis bagaimana bentuk partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto dan apa motif elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto dalam berpartisipasi politik.

---

[12] Noeng Muhajdir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sasaran penelitian dianggap sebagai subyek yang ditempatkan sebagai informan, yang darinya peneliti belajar mengenai apa yang diinginkan.[13] Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto dalam pemilu tahun 2009. Dalam menentukan subyek penelitian peneliti mendasarkan pada karakteristik elit yang ditunjukkan dengan keaktifan sebagai pengurus partai politik, memegang jabatan struktural dalam panitia penyelenggara pemilu dan menjadi kontestan dalam pemilu atau anggota legislatif perempuan terpilih.

3. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, peneliti berusaha untuk menguraikan, menganalisasi, dan menjelaskan bentuk-bentuk serta motif elit politik perempuan dalam berpartisipasi politik di pemilu tahun 2009.

---

[13] Nur Syam, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Solo: Ramadhani, 1992), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data-data tersebut diperoleh. Sumber dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan subyek penelitian di lapangan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[14] Informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh partai politik dan penyelenggara pemilu yang terkait dalam partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto. Penentuan jumlah informan oleh peneliti dianggap telah merepresentasikan karakteristik dari bentuk partisipasi elit politik perempuan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian berbasis kualitatif yang tidak mendasarkan pada kuantitas informan.

2) Sumber data sekunder

Data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal yang menunjang atau dokumen tertulis lainnya seperti:

1. *Gender and Politics,* karya Siti Hariti Sastriyani dkk, Yogyakarta, Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Penerbit Tiara Wacana.

---

[14] Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Kamus Istilah Politik Kontemporer,* karya Akbar Kaelola, Yogyakarta, Cakrawala.
3. *Memahami Ilmu Politik,* karya Ramlan Surbakti, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
4. *Mengenal Teori-Teori politik,* karya Toni Andrianus Pito, Efriza dan Kemal Fasyah, Bandung, Nuansa.
5. *Menggugat Hak Politik Perempuan,* karya Hesti Armiwulan dan Dian Noeswantari, Surabaya, Konsorsium Swara Perempuan (KSP) dan the Ford Foundation Jakarta.
6. *Perbandingan Politik,* karya Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, Jakarta, Erlangga.
7. *Perempuan dan Kekuasaan,* karya Muhammad Anis Qasim Ja'far, Bandung, Zaman Wacana Mulia.
8. *Perempuan dan Politik,* karya Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
9. *Perilaku Partai Politik,* karya M. Khoirul Anwar dan Vina Salviana, Malang, UMM Press.
10. *Politik Berparas Perempuan,* karya Joni Lovenduski, Yogyakarta, Kanisius.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tahap-Tahap Penelitian

Di dalam menguraikan suatu penelitian harus menggunakan prosedur yang jelas, dengan demikian diperlukan tahap-tahap penelitian agar sesuai dengan prosedur yang diinginkan. Oleh karena itu ada beberapa tahap yang dilalui dalam penelitian, antara lain tahap pra lapangan dan tahap pekerjaan lapangan.

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan merupakan sebuah langkah awal di dalam melakukan sebuah penelitian. Bentuk dari tahap dan langkah awal ini adalah peneliti mengawali dengan membuat proposal penelitian, memilih lapangan penelitian dengan pertimbangan letak geografis serta hemat dan praktisnya dalam mempergunakan waktu, tenaga serta biaya.[15]

Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian maka peneliti melakukan kegiatan pra lapangan yaitu:

a) Menemukan masalah
b) Menemukan topik dan fokus masalah
c) Menyusun rancangan penelitian
d) Memilih lapangan penelitian
e) Mengurus perijinan kepeda instansi yang terkait

[15] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahapan pekerjaan lapangan siap dilaksanakan ketika melalui beberapa tahap:

a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Untuk memasuki pekerjaan lapangan terlebih dahulu peneliti memahami latar penelitian, selain itu peneliti mempersiapkan diri secara fisik dan mental.

b) Tahap memasuki lapangan

Pada tahapan ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan ikut peran serta dalam kegiatan lapangan guna memperoleh data yang ada dilapangan. Ketika memasuki lapangan, peneliti harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan subyek penelitian serta mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebiasaan, menggunakan tutur kata yang baik, sopan. Kekeluargaan dan menjaga norma-norma yang berlaku dilapangan penelitian tersebut agar kehadiran peneliti dapat diterima dengan baik.

c. Tahap analisis data

Pada tahap analisis data ini, peneliti menelaah data-data yang telah terkumpul misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun data hasil dari catatan lapangan yang kemudian diolah dan diklasifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kategori data yang dihasilkan yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrument, yakni:

1) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan daftar pertanyaan, dan disertai dengan alat perekam (*interview guide*) atau panduan wawancara.[16]

Jenis wawancara yang digunakan *In-depth interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.[17] Tujuan dilakukan teknik ini adalah untuk mengungkap data yang sangat susah dilakukan dengan *interview* biasa, karena menyangkut informasi yang sensitif seperti menyangkut nilai,

---

[16] M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 234.

[17] Ivan Afriani HS, "Metode Penelitian Kualitatif", http://www.penalaran-unm.org (10 Agustus 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan, maupun keyakinan.[18] Informan yang akan diteliti menggunakan metode wawancara *in-depth interview* adalah elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu teknik penggalian data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berupa catatan-catatan, buku-buku, berkas-berkas maupun dokumen-dokumen tentang partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto. Dengan cara dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui pencatatan atau data-data yang tertulis yang ada di lembaga yang terkait dengan partisipasi politik perempuan seperti KPU, DPRD dan BPS Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang berupa laporan perolehan suara pemilu tahun 2009, jumlah kontestan pemilu, dan data statistik kependudukan.

3) Observasi

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. [19]

---

[18] Arief D Wijaya,"*in depth interview* - Sesi Metode Pengumpulan data", wordpress.com (?)

[19] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet. I* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teknik observasi ini peneliti mengamati secara langsung dan cermat terhadap perilaku individu. Karena dengan teknik ini segala tingkah laku dan aktivitas subyek penelitian sehari-sehari bisa diketahui, sebab dengan observasi merupakan alat yang ampuh untuk menguji suatu kebenaran.

Dalam observasi ini dibutuhkan kamampuan peneliti secara optimal baik dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebebasan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, untuk dapat berpartisipasi di tempat lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka peran aktif peneliti di lapangan sangat diperlukan.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Langkah yang diambil pada tahap ini adalah melakukan pengamatan atas partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto (studi kasus keterlibatan elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto dalam Pemilu Tahun 2009). Dimana peniliti mengamati kegiatan elit politik perempuan di Kabupaten Mojokerto.

7. Teknik Analisis Data

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data menurut Moleong adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh data.[20] Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap sebagaimana versi Miles dan Huberman yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan dengan menggunakan berbagai metode.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data akan dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam proses redukasi data yang akan dilakukan peneliti berusaha melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang dan mana yang merupakan kebutuhan analisis. Menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dengan cara demikian harapannya kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Sajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.
4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi data, yaitu langkah terakhir dari analisa data. Dalam penarikan simpulan ini didasarkan pada reduksi data

[20] Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian,* 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.[21]

Keempat tahapan diatas merupakan satu kesatuan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Hal ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

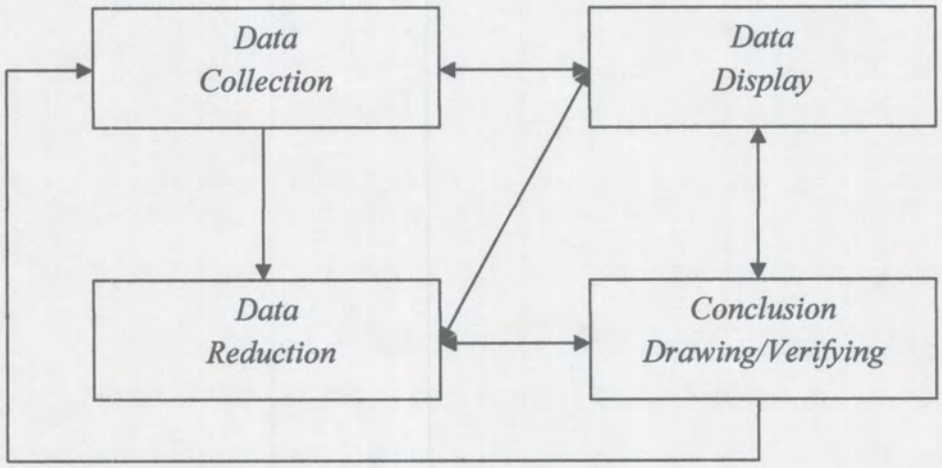

Analisis data versi Miles dan Huberman (1994: 20).

[21] Djama'an Satori, *Metodologi Penelitian* ...,39. Lihat juga, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Alih bahasa Jetjep Rohendi (Jakarta: UI Press,1992), 16-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dalam penelitian ini atas dasar paradigma mikro (naturalistik) yaitu objektif yang dimaksud adalah realitas sebagaimana dipahami dan dihayati oleh subjek (*objectivied subjectivites*). Sedangkan untuk mendapatkan keabsahan data (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1) Derajat kepercayaan (*credibility*)
2) Keteralihan (*transferability*)
3) Kebergantungan (*dependability*)
4) Kepastian (*confirmability*).[22]

Teknik yang digunakan untuk mengetahui objektivitas dan keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik tringulasi sumber. Denzin dan Patton menjelaskan tentang teknik tringulasi sumber yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.[23]

---

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian,* 324.
[23] Ibid, 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana kemampuan yang ada pada penulis maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari sub-sub bab yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang mengungkapkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Kerangka teoritik yang menjelaskan konsep partisipasi politik, elit dalam bangunan teori sosial, dan perspektif perempuan dalam politik. Konseptualisasi dasar inilah yang menjadi alat untuk memahami persoalan mengenai partisipasi politik perempuan itu sendiri.

Bab ketiga, Setting penelitian memaparkan meliputi gambaran lokasi, letak geografis dan gambaran pemilu 2009.

Bab keempat, Berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto.

Bab kelima, Berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Partisipasi Politik

1. Konsep Partisipasi Politik

Berbicara tentang partisipasi politik, tidak lepas dari konteks negara di mana warga negara itu hidup dan bertempat tinggal. Dengan demikian, pembicaraan tentang partisipasi politik akan menyinggung pula sistem politik dan negara yang bersangkutan berlangsung.[1]

Dalam sistem politik demokratis, permasalahan partisipasi politik mendapatkan perhatian utama. Ini mengingat bahwa sistem politik demokratis mengandaikan rakyat atau warga negara adalah pemilik mandat (*stakeholder*) dan pemerintah adalah pelaksana mandat (*agent*). Oleh karena itu, setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah harus mendapatkan legalitas dari sebagian besar atau seluruh warga negara. Partisipasi politik dianggap merupakan sarana yang paling efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan legalitas dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Artinya, semakin besar ruang partisipasi politik yang disediakan oleh sistem politik, maka sistem politik tersebut akan semakin demokratis.[2]

---

[1] Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), 171.

[2] Krishno Hadi dkk, *Perilaku Partai Politik* (Malang: UPT UMM Press, 2006), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang cenderung rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal itu karena perempuan lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tanggga daripada urusan politik. Sedangkan sosialisasi perempuan secara politis cenderung menggiring wanita mendapatkan status tertentu, tanpa usahanya sendiri. Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha untuk memperbesar akses mereka kepada kekuasaan. Oleh karena hanya dengan mempunyai akses besar, perempuan dapat mencapai jabatan-jabatan dalam politik dan pemerintahan. Namun, keuntungan potensial untuk memenangkan persaingan dengan laki-laki ternyata tetap gagal mengimbangi hambatan-hambatan komulatif bagi partisipasi perempuan dalam dunia politik.[3]

Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas, mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu

---

[3] Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.[4] Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Adapun pendapat dari para ilmuwan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang lebih mengenai partisipasi politik. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* memberikan pengertian mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. (*The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).[5]

Sedangkan menurut Keyth Fauls memberikan penegasan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif (*the active angagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintah. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah. Sehingga dari pengertian ini partisipasi politik

---

[4] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 140.

[5] Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 183-184. Di kutip dari Herbert McClosky, "*Political Participation", International Encyclopedia of the Social Sciences*, edisi ke-2 (New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972), XII, hlm. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengertian yang luas mencakup aktivitas mendukung atau terlibat dalam suatu pemerintahan serta aktivitas yang berkaitan dengan penolakan atau beroposisi kepada pemerintah.[6]

Dengan partisipasi politik kita akan mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh semua warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.[7]

Sementara menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi.[8] Hal ini terjadi menurut Huntington dan Nelson, disebabkan oleh sejumlah alasan berikut:

Pertama, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip dari pada alam realitas.

Kedua, dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya.

Ketiga, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi karena faktor internalisasi pada akhirnya

---

[6] Krishno Hadi dkk, *Perilaku Partai...* 19. Di kutip dari Faulks, *Political Sosiology, A Critical Introduction* (Eidenburgh: Eidenburgh University Press, 1999), 133.

[7] Roy C. Marcridis dan Benard E. Brown, *Perbandingan Politik*, Alih bahasa A.R. Henry Sitanggang (Jakarta: Erlangga, 1992), 349.

[8] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menjadi partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi dimobilisasi.

Keempat, kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik.[9]

Di samping pendapat diatas, Lane menyatakan bahwa partisipasi politik juga memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial.
c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologi tertentukan.[10]

2. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti[11] kegiatan partisipasi politik dapat dikategorikan dengan sejumlah kriteria yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri.

---

[9] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik*..., 6-7.
[10] Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik,* Alih bahasa Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 179.
[11] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.

Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar prosedur yang tidak wajar *(non konvensional)* dan berupa kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus seperti lebih memilih kotak kosong dari pada memilih calon yang disodorkan pemerintah, huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.[12]

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap partisipasi dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut dengan apatis atau golongan putih (golput).[13]

---

[12] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu*..., 141-142.
[13] Ibid..., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori.

Pertama, apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

Kedua, spektator artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

Ketiga, gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Keempat, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.[14]

Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni:

1) Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik, inilah bentuk konkret partisipasi aktif.
2) Non partisipan politik, inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok.[15]

---

[14] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...,* 143.

[15] Ustman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin* (Solo: Era Intermedia, 2000), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidak pedulian ini semakin besar pada sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, dan sebagian mereka beranggapan bahwa ketidak pedulian politik merupakan nilai, seperti kaum perempuan pada sebagian masyarakat.

Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik, bentuk konkret sikap ini dapat dilihat pada tiga fenomena yaitu:

a) Ketidak pedulian politik yaitu tidak memberikan perhatian terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepada segala yang datang dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidak mampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak aman.

b) Keraguan politik yaitu ketidak percayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktifitas politik adalah pekerjaan buruk.

c) Keterasingan politik yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi.[16]

Menurut Olsen partisipasi dapat dipandang sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada lain), warga negara, marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem), dan orang yang terisolasikan (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).[17]

Dalam perspektif lainnya, Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara. Karena seperti piramida, bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak dibawah. Ini berarti intensitas partisipasi politik warga negara kebanyakan berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan,

---

[16] Ibid..., 105-106.
[17] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu*..., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membicarakan masalah politik mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilu.

Setingkat lebih maju dari tingkat pengamat yang terletak ditengah-tengah piramida partisipasi politik ialah kelompok partisipan. Pada jenjang partisipan ini aktivitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan, dan aktif dalam proyek-proyek sosial. Kelompok terakhir yang dibagian atas dari piramida partisipasi politik adalah aktivis. Warga yang termasuk dalam kategori aktivis sedikit jumlahnya. Kegiatan politik pada jenjang aktivis ini adalah seperti menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Di samping itu, ada juga warga yang tidak termasuk dalam piramida ini, mereka adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Mereka ini oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang yang apolitis.[18]

Piramida partisipasi politik menurut Roth dan Wilson

[18] Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia...*, 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor Pendorong Partisipasi Politik

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik.

Tinggi rendahnya partisipasi warga dalam proses politik suatu negara setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang di maksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.[19]

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung

[19] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu…*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasif tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).[20]

Kedua faktor di atas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status ekonomi dan status sosial,[21] *afiliasi* politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Tingkat partisipasi warga dalam aktivitas politik juga tergantung tingkat perhatiannya. Maksudnya, tergantung kepada motivasi yang dimilikinya dalam berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat berwujud melalui :

a. Media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi informal.
b. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut.

---

[20] Kamaruddin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004* (Jakarta: Visi Publishing, 2003),95.

[21] Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perasaan individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan, lalu tumbuhlah kecenderungan kepada politik. Hal ini biasanya menyebabkan individu berkembang wawasan politiknya dan ikut andil dalam persaingan politik, sehingga mendorongnya untuk bergabung kepada suatu partai atau kelompok politik tertentu, atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

d. Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu. Misalnya kemampuan untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih dan berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan minat memecahkan problematikanya.

e. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam memepengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologis untuk berpartisipasi.[22]

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Jalbi bahwa partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam melakukan

[22] Ustman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik...*, 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi politik. Faktor jenis individu laki-laki atau perempuan, juga berpengaruh besar terhadap partisipasi politik di sebagian masyarakat. Demikian juga taraf pendidikan, semua itu sering disebut sebagai faktor-faktor sosial.

b. Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik, seperti kultur yang biasa di gambarkan oleh alegori rakyat di desa-desa yang ada di Mesir. Misalnya ungkapan "Yang penting bisa makan, sambil menuju ajal".

c. Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan keapada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya.[23]

Weber mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada seseorang yang didasari oleh motif-motif sebagai berikut :

a. Rasional bernilai, yaitu didasarkan pada penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
b. Afektual dan emosional, didasarkan atas kebencian atau enthuasiasme terhadap suatu ide, organisasi, atau individu.
c. Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial.
d. Rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi.[24]

Menurut Huntington dan Nelson sebab-sebab partisipasi politik bahwa dalam teori, kecenderungan-kecenderungan dan kelompok-kelompok oleh adanya cara-cara alternatif yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.[25]

Sebab-sebab seseorang menggunakan bentuk-bentuk partisipasi politiknya adalah berbagai motivasi yang ada pada kelompoknya dan dirinya, tentang bagaimana caranya agar tujuan-tujuannya tercapai melalui saluran-saluran politik yang ada. Adalah tidak terelakkan bahwa dalam

---

[23] Ibid..., 101-102.
[24] Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi...*, 178-179.
[25] Samuel P. Huntington, dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik...*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaktualisasikan partisipasi politik dibutuhkan media. Huntington dan Nelson melihat basis partisipasi politik dapat bersifat individual atau kelompok. Basis kolektif terbagi atas lima bagian yakni kelas, kelompok komunal, lingkungan, partai politik, dan golongan.

a. Kelas adalah pengelompokan individu atas status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
b. Kelompok komunal diartikan sebagai pengelompokan individual karena persamaan ras, agama, bahasa, dan etnis.
c. Lingkungan adalah individu-individu yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
d. Partai politik adalah individu-individu yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif.
e. Golongan diartikan sebagai individu-individu yang dipersatukan olehinteraksi yang terus-menerus dan intens satu sama lain, salah satu manifestasinya berupa pengelompokan patronklien. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik ini dapat terwujud dengan dalam pelbagai bentuk, namun hal yang menjadi semestinya menjadi pertimbangan utama adalah efektifitas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efisiensi cara dan alternatif dari bentuk partisipasi politik yang dipilih.[26]

4. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekwensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberi suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlahnya orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan ini sebagai aktifis politik yang mencakup antara lain menjadi pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Suatu bentuk partisipasi politik agak mudah di ukur intensitasnya, ialah dengan melihat perilaku masyarakat dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga yang berhak mamilih.

Ahli-ahli politik sering membicarakan berbagai bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan fungsionalisasi demokrasi yang stabil secara efektif. Kebanyakan diskusi ini menegaskan bahwa mayoritas partai-partai menerima undang-undang kompetisi politik yang tertera di dalam konstitusi,

[26] Kamaruddin, *Partai Politik*..., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan kebiasaan, dan tujuan serta metode mereka adalah salah satu atau beberapa dari partai besar yang mendapatkan dirinya eksis di dalam minoritas atau oposisi yang mengandung resiko yang dapat di terima. Konsepsi informal tentang karakteristik mayoritas dan oposisi dalam demokrasi yang yang efektif secara tidak langsung menyatakan adanya perasaan yang tidak umum, bahwa ia menganggap adanya perasaan partisan. Di dalamnya termasuk sikap memihak, keyakinan dan perasaan tentang arah tindakan politik yang layak, membantu beberapa kelompok dan mnentang yang lainnya.[27]

Seperti yang telah dikemukakan, partisipasi politik adalah suatu usaha terorganisir para warga masyarakat untk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Bentuk partisipasi politik dapat diwujudkan dalam usaha-usaha untuk pembuatan keputusan politik, pemberian suara ataupun hak untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam kenyataannya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil atau minoritas warga negara saja. Dalam hubungan ini perlu diketahui bahwa elitlah yang menguasai dan mengendalikan kekuasaan tersebut tidak sama di setiap negara, ataupun daerah bahkan bervariasi.

Jika elit yang berkuasa tersebut bisa menempatkan diri dan berfungsi secara proporsional, barang kali tidak menimbulkan permasalahan yang berarti. Tetapi sering kali menimbulkan masalah serius, seperti adanya kecenderungan kelompok elit untuk menolak atau paling tidak membatasi

---

[27] Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara,* Alih Bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Bumi Angkasa, 1990), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik. Berbicara soal partisipasi politik, dirasakan kurang lengkap jika tidak disertai pertimbangan yang jelas tentang bagaimana partisipasi politik itu diwujudkan, atau lewat cara-cara apa saja partisipasi itu bisa dilaksanakan dengan efektif.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang normal atau sudah umum dalam demokrasi modern adalah meliputi:

1. Aktifitas pemberian suara (votting)
2. Diskusi politik
3. Kegiatan kampanye politik
4. Bergabung dalam kelompok kepentingan (seperti masuk partai politik)
5. Ataupun melaksanakan komunikasi individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif.[28]

Adapun tipe-tipe dari partisipasi politik masyarakat antara lain:

1. Partisipan terbuka adalah para responden yang mengungkapkan ketidak acuhanterhadap perkawinan antar partai, yang dijelaskan keterlibatan dirinya sendiri secara emosional dalam konteks pemilihan. Partisipan terbuka ini dilibatkan dalam pemilihan

[28] Cheppy Hericahyono, *Ilmu Politik...*, 180-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi tidak sedemikian penuh, karena mereka berusaha memutuskan hubungan dengan anggota-anggota partai oposisi.

2. Partisipan yang apatis nampaknya kontradiktif untuk menyatakan partisipan yang apatis, tetapi mereka adalah para responden yang memilih salah satu partai besar, yang menyatakan ketidak acuhan terhadap perkawinan antar partai dan mengingkari terhadap ketiga perasaan terhadap pemilihan yang disajikan dalam interview kita (seperti marah, senang, dan masa bodoh). Mereka pemilih yang acuh tak acuh, yang terdapat disemua lapisan masyarakat, yang memberikan suara dan pilihannya.
3. Partisipan yang bersemangat adalah para responden yang prihatin terhadap perkawinan antar partai dan secara emosional terhadap pemilihan. Mereka secara tegas terpisah dari partai saingannya dan secara emosional terlibat dalam konteks pemilihan.[29]

5. Partisipasi Sebagai Akibat dari Sosialisasi

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

[29] Almond dan Verba, *Budaya Politik*..., 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, di mana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik.[30].

Ada beberapa defenisi mengenai konsepsi sosialisasi yang berkisar pada keberadaanya sebagai proses instruksi, penanaman dan pengajaran, atau bahwa ia adalah proses untuk mendapatkan sesuatu.

Menurut David F. Aberle dalam dalam *Culture and Socialization* menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkahlaku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan termasuk ilmu pengetahuan, motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan dan yang terus berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan masih harus terus dipelajari. [31]

---

[30] Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 135-136.

[31] Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia: Dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: Penerbit SIC kerjasama dengan LPM IKIP Surabaya, 1998), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gabriel A. Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu genarasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.[32]

Sementara itu tujuan sosialisasi politik menurut Ghanim adalah untuk mengembangkan individu sebagai person politik atau pribadi politik. Yakni sejumlah orientasi yang terbentuk dalam diri individu untuk menghadapi dunia politik, termasuk di dalamnya pandangan tentang peran politiknya secara khusus.

Sosialisasi politik sebagai kegiatan yang bertujuan membentuk kepribadian politik, dalam arti bahwa seseorang memperoleh orientasi politik yang memiliki tiga unsur yakni nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mendasar, pengetahuan dan informasi serta perspektif-perspektif politik, serta perasaan dan emosi berikut orientasi-orientasi politik. Oleh sebab itu, ia merupakan proses dimana perubahan kultur tertentu menuju orientasi dan praktek politik terjadi.

Partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik mensyaratkan adanya sosialisasi politik yang harus dialami oleh setiap individu. Karena tanpa adanya sosialisasi politik tidak akan mengakibatkan terjadinya partisipasi politik. Pengalaman yang diperoleh melalui sosialisasi politik akan

[32] Ibid..., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan perilaku dan orientasi individu dalam aktivitas politik, di samping menentukan sejauhmana partisipasi politiknya.

Easton dan Dennis mengutarakan tahapan dalam proses sosialisasi politik, yaitu :

a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, anak, presiden, dan polisi.
b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu pejabat swasta dan pejabat negara.[33]

Rendahnya kualitas partisipasi warga negara Indonesia juga disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang rendah menyebabkan rendahnya pemahaman politik yang mereka miliki. Rendahnya intensitas sosialisasi tersebut dapat disebabkan oleh budaya politik maupun non politik yang tidak menguntungkan mereka.

B. Elit dalam Bangunan Teori Sosial

Studi tentang elit menjadi studi sosiologis yang menarik untuk di kaji sebagai istilah yang menunjuk pada minoritas-minoritas pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial sebagai sebagai minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab. [34]

---

[33]Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik…*, 34.

[34] Suzzane Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peran Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern* , Alih bahasa Zahara D. Noer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori elit dibangun di atas pandangan atau persepsi bahwa keberadaan elit baik elit politik maupun elit agama tidak dapat dielakkan dari aspek-aspek kehidupan modern yang serba kompleks. Dalam sejarahnya, jumlah elit cenderung lebih sedikit akibat legitimasi dari masyarakat demikian berat.

Ada dua tradisi akademik tentang elit, dalam tradisi yang lebih tua elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul. Elit dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Dalam pendekatan yang lebih baru, elit dipandang sebagai suatu kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin atau pembuat keputusan.[35]

Dalam masyarakat yang menganut paham demokrasi, maka keberadaan elit tidak bisa dilepaskan dari adanya proses sosial yang berkembang. Keller mengemukakan empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elit yakni :

1) pertumbuhan penduduk
2) pertumbuhan spesialisasi jabatan
3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi
4) perkembangan keagamaan moral

[35] Ibid..., 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berjalannya proses itu, kaum elit pun menjadi semakin banyak, semakin beraneka ragam dan lebih bersifat otonom. [36]

Huky membagi elit ke dalam tiga kategori :

1) Elit karena kekayaan, kekayaan menjadi suatu sumber kekuasaan. Orang-orang kaya tergabung ke dalam *group* tertentu baik bersifat konkrit maupun abstrak dan mengontrol masyarakat di sekitarnya, seperti majikan dengan posisi elit dalam mengontrol bawahannya.
2) Elit karena eksekutif, *Group* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai posisi strategis dalam strategi di bidang tertentu. Dengan posisi yang strategis ini, ia memperoleh kekuasaan mengontrol dan mempengaruhi orang lain. Misalnya pejabat-pejabat pemerintah pada kedudukan yang strategis.
3) Elit komunitas, orang-orang tertentu dalam suatu komunitas dipandang sebagai kelompok yang dapat mempengaruhi kelompok lain. [37]

Sementara itu, Baswedan membedakan tiga macam tipe elit yakni:

1) Elit intelektual merupakan elit yang didasarkan atas ukuran tingkat pendidikan.
2) Elit aktivis merupakan sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi-organisasi yang mengkaitkan diri dengan dunia politik.

---

[36] Suzzane Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit...*, 87.

[37] Di kutip dari Usup Supriyadi, http://anokjang.multiply.com/recipes/item/4/ pengertian _ dan_ perkembangan_teori_elit_politik, 16 Februari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Elit militer merupakan aktor-aktor yang menginstitusikan dirinya dalam dunia militer.[38]

Simandjuntak mengemukakan bahwa dalam masyarakat terdapat enam golongan elit, yaitu :

1) Elit politik yang bertindak sebagai legitimizer dari politik pembangunan yang hendak dilaksanakan.
2) Elit administrasi yang bertugas menterjemahkan keinginan politik menjadi rencana pembangunan.
3) Elit cendekiawan yang bertugas mengembangkan teori yang dapat diterapkan dalam pembangunan serta membawa ide pembaharuan.
4) Elit usahawan yang bertugas menunjang politik pembangunan yang telah digariskan melalui penanaman modal.
5) Elit militer yang bertugas sebagai pelopor peningkatan kedisiplinan kerja, sumber *resources* (penghasilan) dalam lapangan tenaga kerja, dan penengah timbulnya konflik di antara kelompok masyarakat.
6) Elit *massa media* yang bertugas menyalurkan informasi serta pembentukan pendapat umum. [39]

Secara umum, elit merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan-kedudukan tinggi. Dalam arti yang lebih khusus, elit juga ditunjukkan

---

[38] Di kutip,dari *Partisipasi Politik Di Indonesia Suatu Tinjauan Dari Teori Elit*, http://gshk.blogspot.com/2010/04/teori-elite.html. 19 Mei 2010.

[39] Di kutip dari *Partisipasi Politik Di Indonesia Suatu Tinjauan Dari Teori Elit*, http://gshk.blogspot.com/2010/04/teori-elite.html. 19 Mei 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh sekelompok orang terkemuka dalam bidang-bidang tertentu dan khususnya kelompok kecil yang memegang pemerintahan serta lingkungan dimana kekuasaan itu diambil. Dengan demikian, konsep tentang elit cenderung lebih menekankan kepada elit politik dengan merujuk pada pembagian elit penguasa dan elit yang tidak berkuasa yang mengarah kepada adanya kepentingan yang berbeda.

Elit politik merupakan individu-individu yang memiliki keistimewaan dalam pemahaman, pemaparan, dan pengalaman mengenai sistem kekuasaan selain itu, elit politik juga merupakan individu yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai suatu minoritas yang memiliki status sosial dalam peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Sehingga dengan kedudukan yang istimewa inilah kemudian elit menjadi faktor penentu yang berperan dalam mendorong dan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.[40]

C. Perempuan dalam Perspektif Politik

Diskursus mengenai perempuan terlibat dalam politik memunculkan permasalahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun demikian hadirnya perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik merupakan salah satu indikasi kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah bangsa.

---

[40] Suzzane Keller, *Penguasa dan Kelompok...*, 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini merupakan beberapa pandangan tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai berikut :

1. Perspektif Politik Perempuan dalam Gender

Dalam perspektif gender yang di usung oleh kalangan feminis terdapat adagium yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam bidang politik maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan baik yang bersifat struktural maupun kultural dapat ditiadakan.

Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan selama ini jauh dari nilai-nilai keadilan, perempuan senantiasa diposisikan secara subordinat sementara laki-laki berada pada posisi dominan. Selanjutnya kalangan feminis mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Mereka menganggap bahwa selama ini kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga poltik formal yang *notabene* akan mengambil keputusan publik sedikit tidaknya telah berdampak pada kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak sensitif gender. Misalkan saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, pendidikan, dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya. [41]

Hal tersebut menjadi relevan ketika politik sendiri dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Pemaknaan politik yang demikian kemudian bermuara pada lahirnya ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik. Kaum perempuan selalu diarahkan untuk mampu menempatkan diri dan berkiprah di elite kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi negara yang membuat undang-undang.[42]

Tahun 1990, UNDP *(United Nations Develepoment Programme)* menambahkan satu indikator baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, jika sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan GDP *(Growth Domestic Product)* kini ditambah dengan HDI *(Human Development Index)* yang salah satu ukurannya adalah konsep kesetaraan gender *(gender equality)*. Dikatakan bahwa faktor kesetaraan gender harus selalu diikutkan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan

---

[41] Ani Widyani Soejtipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), xxxi.
[42] Di kutip dari, Nazia Jalali, *Peran Wanita di Dunia Politik*, http://www.al-ibrah.com/peran-wanita-di-dunia-politik.htm, (16 Februari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional. Perhitungan yang dipakai adalah GDI (*Gender Development Index),* yaitu kesetaraan antara pria dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, serta GEM *(Gender Empowerment Measure),* yang mengukur kesetaraan dari partisipasi politik (*Human Development Report,* 1995).

Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya tindakan *affirmatif action* yaitu kuota 30 % bagi perempuan Indonesia yang terangkum dalam Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008. Perjuangan kaum feminis ini sebelumnya banyak mendapat respon yang bersikap pro maupun kontra terhadap ide tersebut.

Bila menelusuri perjuangan kaum feminis di Indonesia, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sebuah rentetan sejarah dan ideologis yang menyertainya. Menurut Bahsin dan Khan bahwa munculnya feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.[43]

Gerakan feminisme sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai di Barat sejak abad XVII, namun mengalami pasang surut. Baru

---

[43] Di kutip dari, Nazia Jalali, *Peran Wanita di Dunia Politik*, http://www.al-ibrah.com/peran-wanita-di-dunia-politik.htm, (16 Februari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 1960-an, khususnya di Amerika mulai marak kembali dengan skala pengkajian dan penyebaran lebih intens dan meluas. Dalam kurun waktu itu dikenal berbagai aliran atau sebutan gerakan feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme postmodern, feminisme anarkis, feminisme Marxis, feminisme sosialis, dan feminisme Nordic.[44]

Menurut Hubies bahwa feminisme memiliki dasar preposisi sebagai berikut :

a) Feminisme muncul sebagai reaksi kesadaran beroposisi terhadap fitnah dan ketidak adilan perlakuan terhadap perempuan dalam bentuk oposisi dialektis terhadap praktek *mysogini* atau kekejaman laki-laki terhadap perempuan
b) Ada keyakinan dalam masyarakat yang perlu diretas, dinyatakan bahwa identitas sosial jenis kelamin bersifat kultural, bukan berifat biologis.
c) Berkeyakinan bahwa adanya kelompok sosial perempuan merupakan penegas eksistensi kelompok sosial laki-laki, dalam arti bahwa kelemahan atau kelebihan kelompok jenis sosial kelamin tertentu sekaligus pula menampakkan kelemahan dan kelebihan

[44] Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komperhensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis,* alih Bahasa Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), 1-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

kelompok sosial jenis kelamin lainnya. Maksudnya tidak ada jenis kelamin tertentu yang mutlak dalam kehidupan sosial.

d) Adanya kesamaan sudut pandang dalam melihat dan memahami warisan sistem nilai yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk menentang pembedaan dan pembatasan jenis kelamin yang dikonstruksi oleh budaya

e) Adanya keinginan untuk menerima konsep manusia dan prikemanusiaan secara lebih hakiki. [45]

Preposisi diatas memberikan penjelasan bahwa setiap manusia memiliki peluang dan kesempatan yang sama menjadi yang terbaik, khususnya pada perempuan. Dengan demikian bahwa pandangan para feminisme mengenai keterlibatan perempuan dalam politik merupakan suatu manifestasi gerakan untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan perempuan dari penindasan dan ketidak adilan.

2. Perspektif Politik Perempuan dalam Islam

Dalam perspektif Islam keterlibatan perempuan dalam bidang politik memiliki *epistemologis* bahwa pada hakikatnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang sosial dan ekonomi, serta ragam kegiatan

[45] Di kutip dari, Nazia Jalali, *Peran Wanita di Dunia Politik*, http://www.al-ibrah.com/peran-wanita-di-dunia-politik.htm, (16 Februari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Sehingga dalam hal perempuan berpolitik tidaklah menjadi masalah manakala memperhatikan landasan-landasan fundamental dalam agama, ijtihad ulama kontemporer serta mencontoh dari aktivitas para sababat Rasulullah dari kalangan wanita.[46]

Landasan fundamental merupakan *legitimasi* hukum yang tercantum dalam ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung *mission statement* bagi setiap muslim secara umum. Sedangkan contoh aktivitas politik sahabat Rasulullah SAW dari kalangan wanita dapat dijadikan sebagai bukti untuk menepis keraguan sebagian kalangan tentang hukum keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Dalam catatan sejarah kiprah para perempuan yang aktif di dunia politik dikenal misalnya, Fatimah binti Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar, 'Atika binti Yazid ibn mu'awiyah, Ummu Salamah binti Ya'kub, al-Khaizaran binti 'Athok.[47]

Tentang ijtihad ulama mengenai peran politik perempuan seperti diungkapkan oleh Ghazali dalam Ridha bahwa perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan hak dipilih menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah, juga hak untuk

---

[46] Muhammad Rasyid Ridha, *Perempuan Sebagai Kekasih: Hakikat, Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik* (Bandung: Penerbit Hikmah, 2004), 26.

[47] Qomarul Huda, *Status Perempuan dalam Perspektif Islam (Antara Normative dan Realitas),* AHKAM Jurnal Hukum Islam, Volume 09 Nomor 01, Juli 2007 (Tulungagung: LP3M unit penerbit STAIN Tulungagung), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang jabatan keanggotaan di majelis itu, juga hak untuk memegang tampuk kepemimpinan selain *imamah kubra* (khalifah) dan derivatnya. [48]

Dengan demikian dapat ditarik sebuah perbedaan yang mendasar antara kedua perspektif ini, bahwa kaum feminis lebih menekankan pada tuntutan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala bidang. Sementara dalam ajaran Islam bahwa perempuan pada dasarnya memiliki eksistensi yang tak pernah dinomor duakan. Kaum perempuan memiliki harkat dan keluhuran yang diakui oleh Islam. Sehingga perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam hanya terletak pada kedalaman iman dan amal shalih dari masing-masing individu.

Sehingga keterlibatan perempuan dalam bidang politik haruslah menghadirkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, tanpa harus menuntut kesetaraan posisi dan peran seperti yang didengungkan oleh kalangan feminis. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap perempuan Islam dalam keterlibatannya di ranah politik.

---

[48] Muhammad Rasyid Ridha, *Perempuan Sebagai...*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah

Kabupaten Mojokerto adalah salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur, Mojokerto dahulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga tahun 1500 M. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389.

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Budha terakhir yang menguasai semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar di Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Borneo, Kepulauan Sulu, Manila Saludung, hingga Indonesia Timur, meskipun kekuasaanya masih diperdebatkan.[1]

---

[1] Prapantja, Rakawi, trans. by Theodore Gauthier Pigeaud, *Java in the 14th Century, A Study in Cultural History: The Negara-Kertagama by Pakawi Parakanca of Majapahit, 1365 AD* (The Hague, Martinus Nijhoff, 1962), vol. 4, p. 29. 34; G.J. Resink, *Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory* (The Hague: W. van Hoeve, 1968), hal. 21. http://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit. (19 Mei 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto telah disepakati, setelah melalui proses pembahasan didalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto. Bahwa Hari Jadi Kabupaten Mojokerto adalah tanggal 9 Mei 1293 Masehi, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 09 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993, tentang persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto saat itu H. Mahmoed Zain, SH mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor: 230 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto.[2]

2. Letak Geografis

1) Letak dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Mojokerto terletak antara garis 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" bujur timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47" lintang selatan. Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, secara administratif Kabupaten Mojokerto dibatasi oleh beberapa daerah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

[2] http://www.mojokertokab.go.id (20 februari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang.
- Sebalah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang.

Disamping itu wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.[3]

Sumber: mojokerto map, google.com (20 februari 2010)

2) Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, trawas,

[3] BPS Kabupaten Mojokerto dalam angka tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gondang dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang subur.

Sekitar 30 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15 derajat. Letak ketinggian kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada dibawah 500 m dari permukaan laut, kecamatan yang memiliki ketinggian tertinggi adalah Kecamatan pacet, dimana ketinggiannya berada pada lebih 700 m dari permukaan laut. Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 304 desa. Luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten Mojokerto adalah 692,15 km^2, dimana bila kita amati wilayah Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar. Sedangkan kecamatan Ngoro dan Jetis mempunyai luas wilayah terbesar kedua dan ketiga.

Tabel. 1

Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tinggi rata-rata dari permukaan laut (m)	Luas daerah (km^2)
1.	Jati rejo	140	32,95
2.	Gondang	240	39,11
3.	Pacet	570	45,16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Trawas	800	29,87
5.	Ngoro	25	57,48
6.	Pungging	30	48,14
7.	Kutorejo	500	42,83
8.	Mojosari	36	26,65
9.	Bangsal	30	24,06
10.	Mojoanyar	23	23,02
11.	Dlanggu	17	35,42
12.	Puri	70	35,62
13.	Trowulan	40	39,20
14.	Sooko	64	23,46
15.	Gedek	26	22,98
16.	Kemlagi	22	50,05
17.	Jetis	35	57,17
18.	Dawarblandong	75	59,93

Sumber: BPS Kabupaten

3. Demografis

Menurut hasil regrestrasi dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten penduduk sampai dengan bulan Januari 2010 jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto berjumlah 1.076.467. Jumlah penduduk laki-laki 541.235 sedang jumlah penduduk perempuan 535.232, sek rasio penduduk Kabupaten Mojokerto sampai dengan bulan April 2010 adalah 1.011 hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki Kabupaten Mojokerto lebih banyak dibanding perempuan.

Kepadatan penduduk rata kabupaten Mojokerto sampai bulan Mei 2010 adalah 1.555,25 jiwa setiap km^2, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Jati rejo	20.879	20.365	41.244	12.288
2.	Gondang	20.986	20.823	41.809	12.559
3.	Pacet	27.934	27.885	55.819	17.553
4.	Trawas	14.675	14.767	29.442	9.009
5.	Ngoro	38.399	38.386	76.785	22.961
6.	Pungging	36.672	36.230	72.902	21.947
7.	Kutorejo	30.646	29.902	60.548	17.979
8.	Mojosari	38.624	37.616	76.240	22.334
9.	Bangsal	25.033	24.482	49.515	14.830
10.	Mojoanyar	24.744	24.109	48.853	13.947
11.	Dlanggu	27.449	27.319	54.768	16.114
12.	Puri	36.077	35.682	71.759	20.355
13.	Trowulan	36.403	35.766	72.169	21.699
14.	Sooko	37.052	36.262	73.314	20.023
15.	Gedek	30.202	29.818	60.020	17.957
16.	Kemlagi	29.110	29.330	58.440	17.156
17.	Jetis	41.231	40.718	81.949	24.599
18.	Dawarblandong	25.119	25.772	50.891	15.317
Jumlah		**541.235**	**535.232**	**1.076.467**	**318.627**

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin

No.	Golongan Umur (tahun)	Jumlah Penduduk			
		Jenis Kelamin		Total Jiwa	Jumlah Komulatif (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	0 Th - 4 Th	28.049	26.405	54.454	54.454
2.	5 Th - 9 Th	41.191	38.639	79.830	134.284
3.	10 Th - 14 Th	47.238	44.303	91.541	225.825

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	15 Th - 19 Th	44.470	42.651	87.121	312.946
5.	20 Th - 24 Th	44.589	43.411	88.000	400.946
6.	25 Th - 29 Th	51.708	52.101	103.809	504.755
7.	30 Th - 34 Th	49.179	47.759	96.938	601.693
8.	35 Th - 39 Th	49.446	48.775	98.221	699.914
9.	40 Th - 44 Th	47.130	46.794	93.924	793.838
10.	45 Th - 49 Th	38.328	38.332	76.660	870.498
11.	50 Th - 54 Th	31.894	30.069	61.963	932.461
12.	55 Th - 59 Th	22.969	21.221	44.190	976.651
13.	60 Th – 64 Th	15.235	16.880	32.115	1.008.766
14.	65 Th - 69 Th	13.236	15.325	28.561	1.037.327
15.	70 Th - 74 Th	8.202	10.658	18.860	1.056.187
16.	> 75	8.202	11.909	20.280	1.076.467
Jumlah		**541.235**	**535.232**	**1.076.467**	

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

4. Aspek Ekonomi

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai kedudukan wilayah strategis, baik dari segi letak maupun potensi sumberdaya alam. Kabupaten Mojokerto terletak pada suatu bentang alam yang bervariasi dan sangat kaya akan sumberdaya alam. Kekayaan sumberdaya alam tersebut berakibat pada perkembangan penduduk dan aspek-aspek sosial ekonomi lain yang cukup pesat pula, sehingga berakibat pula pada bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang bervariatif dan selalu meningkat. Beberapa potensi berbasis sumberdaya alam antara lain pertambangan dan pertanian dalam arti luas.

Karena letaknya yang cukup strategis, 50 km arah barat Kota Surabaya, daerah ini menjadi *hinterland* kota metropolitan dan termasuk dalam gerbangkertasusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Lamongan). Daerah-daerah ini merupakan kelompok kawasan yang menyangga Kota Surabaya. Sebagai daerah penyangga, roda perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di Surabaya. Oleh karena itu mata pencaharian penduduk cenderung kearah lapangan usaha perdagangan, angkutan dan industri pengolahan.[4]

Posisi tersebut mengakibatkan, di satu sisi perkembangan Kabupaten Mojokerto dipengaruhi dari perekonomian Kota Surabaya di pihak lain memberikan peluang dan kesempatan bagi Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalisasikan seluruh potensinya dan menggaet limpahan modal dari Surabaya.

Gabungan potensi sumberdaya alam yang potensial dan letak strategis telah mengakibatkan munculnya berbagai macam peluang kerja dan berusaha yang cukup luas di Kabupaten Mojokerto. Pesatnya perkembangan jasa dan perdagangan, perumahan dan konstruksi, serta transportasi telah memberikan dampak yang positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak potensi sumberdaya yang belum optimal pemanfaatannya, khususnya yang berbasis langsung kepada ekonomi masyarakat lokal, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata.

---

[4] http://mojokertokab.go.id/PEREKONOMIAN/site/index.php/data-kependudukan. (22 Februari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Mojokerto mempunyai kebijakan di bidang Ekonomi diarahkan untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian dengan berbasis demokratis yang stabil dengan sasaran memperkukuh Remo wibawa *clan* legitimasi pemerintah, didukung partisipasi dari kepercayaan rakyat. Dengan melihat kondisi dan potensi di basis-basis yang ada di Kabupaten Mojokerto telah memberikan beberapa indikasi untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan vang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin.
b. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
c. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja *clan* berusaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

d. Memberdayakan pengusaha kecil, menenengah, dan koperasi agar harga lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Fasilitas dari Pemerintah di berikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dan persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi permodalan, dan lokasi berusaha.

e. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan badan usaha milik daerah, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah.

f. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Tetap menjaga eksistensi dan keterkaitan antara pertanian perdagangan dan industri menuju pernbangunan ekonomi yang berketerkaitan.

h. Menyehatkan anggaran belanja pendapatan dan belanja daerah dengan mengurangi defisit anggaran metal peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur serta penghematan pengeluaran.

i. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah tertentu.

j. Menata Badan Usaha Milik Daerah secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak di lakukan oleh swasta dan koperasi.

k. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan manfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumberdaya lokal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak setempat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

m. Penguatan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia alam, kelembagaan, maupun sumber-sumber lain yang bersifat inmaterial atau spiritual.

n. Pengembangan potensi sumber produksi yang berasal faktor manusia dikelola dengan menekankan kemampuan berinisiatif dan secara kreatif mampu memanfaat sumber-sumber dan segenap potensi yang ada disekitar untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kebaikan bersama.

o. Pengembangan potensi sumber produksi yang berasal dari alam dikelola dengan menekankan keseimbangan dan pemanfaatan sebesar-besarnya nilai tambah kekayaan selam dengan daya dukung sumber-sumber hayati maupun non hayati bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.

p. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya lahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedia pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang butuhkan dalam tingkat harga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjangkau dengan memperhatikan peningkatan produksi dan pendapatan petani.

q. Pengembangan agribisnis dan agroindustri, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dengan dukungan jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, konsultasi, penelitian, pengembangan, pendidikan dan penyuluhan.

5. Aspek Sosial Budaya

1) Pendidikan

Sarana pendidikan di wilayah Kabupaten Mojokerto meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sekolah, kelas dan guru, baik di SD, SLTP, SMU maupun SMK rata-rata mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2008, total jumlah murid SD menurun sebesar 0,49%. Sebaliknya di tingkat SLTP naik sebesar 2,94%. Sedangkan di tingkat SMU/SMK menuingkat sebesar 5,67%. Rasio murid Guru tiap tingkatan pendidikan adalah di tingkat SD: 13,21 di tingkat SLTA: 12,15 di tingkat SMU: 10,23 serta di tingkat SMK: 11,82.

Jumlah Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Mojokerto cenderung naik dari tahun ke tahun. Tahun 2008 jumlah mahasiswa seluruhnya sebesar 6.666 orang atau naik 30,55%. Begitu juga dengan jumlah lulusan perguruan tinggi sebesar 7.497 atau naik sebesar 48,19%.[5]

[5] Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Agama

Masyarakat Kabupaten Mojokerto merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam 98,58% diikuti Kristen protestan 1,09%, Hindu 0,05%, Budha 0,08%. Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam table 4 berikut ini:

Tabel 4.

Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Kabupaten Mojokerto

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1.	Jati rejo	20.242	11	60	-	-
2.	Gondang	36.473	285	267	250	111
3.	Pacet	51.146	440	153	2	16
4.	Trawas	28.243	73	52	-	2
5.	Ngoro	6.401	169	17	4	9
6.	Pungging	71.820	206	53	22	43
7.	Kutorejo	52.005	105	26	11	10
8.	Mojosari	71.839	1.172	267	168	343
9.	Bangsal	46.725	58	5	9	8
10.	Mojoanyar	43.583	338	11	2	-
11.	Dlanggu	50.558	1.011	46	7	22
12.	Puri	59.169	353	92	4	-
13.	Trowulan	68.272	198	198	17	13
14.	Sooko	60.651	522	222	25	18
15.	Gedek	57.835	662	481	1	11
16.	Kemlagi	55.561	677	5	7	8
17.	Jetis	79.724	1.467	171	1	30
18.	Dawarblandong	48.830	392	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 5.

Tempat Peribadatan Menurut Jenis Rumah Ibadah

No.	Kecamatan	Masjid	Langggar/ Mushola	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Pura/ Kuil	Wihara
1.	Jati rejo	50	187	-	-	-	-
2.	Gondang	44	167	2	-	3	-
3.	Pacet	81	219	6	1	-	-
4.	Trawas	35	139	-	-	-	-
5.	Ngoro	62	458	1	1	-	-
6.	Pungging	66	283	-	-	1	-
7.	Kutorejo	88	287	1	1	-	-
8.	Mojosari	38	234	5	-	1	1
9.	Bangsal	48	40	1	-	1	1
10.	Mojoanyar	35	153	1	-	-	-
11.	Dlanggu	58	189	3	-	-	-
12.	Puri	73	224	1	-	-	-
13.	Trowulan	64	238	1	-	-	-
14.	Sooko	53	191	1	-	-	-
15.	Gedek	35	151	3	-	-	-
16.	Kemlagi	40	147	4	-	-	-
17.	Jetis	67	301	5	-	-	-
18.	Dawarblandong	53	157	6	1	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

3) Kesehatan

Fasilitas dan sarana kesehatan masyarakat meningkat kuantitas serta kualitasnya. Pada tahun 2008, puskesmas yang menerima rawat inap berjumlah 10, Balai Pengobatan berjumlah 32, tempat praktek dokter umum bertambah menjadi 169, dan apotek menjadi 40 tempat. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kesehatan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tenaga dokter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesialis bertambah 1 orang, tenaga bidan bertambah 10,76% tenaga bidan desa jumlah tetap, tenaga perawat bertambah sebesar 25,41%.[6]

Ada 4 (empat) aspek penting dalam bidang sosial budaya yang sangat diperhatian. Yang sungguh-sungguh dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto, yaitu aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesempatan dan pariwisata.

1) Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menggerak pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan serta memelihara dan meningkatkan kesehatan Individu keluarga, masyarakat, beserta lingkungan.
   a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.
   b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta prasarana dan sarana bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat di jangkau oleh masyarakat serta mendorong kemandirian masyarakat menuju kehidupan sejahtera.

[6] Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.[7]

2) Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata

a. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan daerah, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembang kebudayaan daerah dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

---

[7] http://www.mojokertokab.go.id (20 Februari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah budaya yang serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dan berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pembangunan inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap total kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral estetika dan agama.

e. Melestarikan aspirasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang sang kembangan kesenian daerah yang lebih kreatif inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan daerah.

f. Menjadikan kesenian, kebudayaan tradisional peninggalan sejarah sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata daerah dan mempromosikannya secara konsisten.

g. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan serta pelestarian peninggalan sejarah.

3) Kedudukan dan Peranan Perempuan.

a. Membantu meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan bebangsa dan bernegara melalui kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

4) Pemuda dan Olah Raga

a. Menumbuhkan budaya berolah raga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia, agar memiliki tingkat kesehatan clan kebugaran yang optimal, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.

b. Meningkatkan usaha pembibitan *clan* pembinaan olah raga serta prestasi yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing induk organisasi cabang olah raga bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan.

c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul,dan mandiri.

e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotik,obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan penanggulangan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.[8]

B. Profil Pemilu Kabupaten Mojokerto Tahun 2009

Dengan diberlakukannya undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Partai Politik, jumlah Partai Politik yang terdaftar dalam Departemen Kehakiman sebanyak 114 Partai Poitik, dari 114 Partai Politik tersebut yang memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilu 1999 adalah 48 Partai Politik. Di tahun 2004 berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bahwa partai yang berhak mengikuti pemilu 2004 adalah yang lolos dalam aturan *electoral treshold* atau jumlah suara minimal 2% dalam pemilu 1999. Sementara partai-partai politik yang tidak memenuhi jumlah minimal suara dapat bergabung atau mengganti namanya dengan nama baru dan mengikuti proses verifikasi partai

[8] http://www.mojokertokab.go.id (20 Februari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Sehingga dalam pemilu 2004 Komisi Pemilihan umum menetapkan sebanyak 24 partai politik sebagai kontestan pemilu. Untuk pemilu 2009 Komisi Pemilihan Umum menetapkan 38 partai politik sebagai kontestan pemilu.

Secara umum penyelenggaraan pemilu tahun 2009 di Kabupaten Mojokerto tergolong sukses, aman, tertib, dan lancar, artinya pelaksanaan Pemilu telah sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 sampai tahun 2009 telah memberikan dampak yang berarti terhadap perubahan pola pikir dan sikap sebagian besar warga Kabupaten Mojokerto dalam partisipasi politiknya. Sikap warga masyarakat dalam berpolitik ada yang apatis, yaitu tidak berminat, sinis, bersikap curiga, alienasi yaitu merasa terasing dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat, dan ada yang anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tidak memiliki motivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini.

Pemilu tahun 2009 bagi warga Kabupaten Mojokerto secara umum dianggap sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, yang terpenting mereka datang ke TPS pada saat pemungutan suara dilakukan. Akan tetapi, dalam pemilu tahun 2009 ada perbedaan yang signifikan daripada pemilu sebelumnya yakni masyarakat memilih secara langsung Presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Walaupun ini bukan kali pertama masyarakat memilih secara langsung. Pemilu tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan No. 10 Tahun 2009 tahapan pemilihan umum yang terdiri dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
2. Pencalonan
3. Pencetakan dan pendistribusian
4. Kampanye
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, terdiri dari:
    a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
    b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Komisi Kabupaten (KPU Kabupaten)
6. Penetapan Hasil Pemilihan Umum
7. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji.[9]

Dalam pemilu tahun 2009 tidak luput dari dinamika yang terjadi. Hal ini terlihat dari aktivitas-aktivitas politik dalam pemilu seperti kesertaan warga dalam kampanye partai politik maupun pada saat pelaksanaan pemilu. Terjadinya perbedaan-perbedaan pilihan politik juga merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari sistem politik dan demokrasi yang semakin terbuka.

Perbedaan-perbedaan pilihan tersebut menjadi sangat wajar sebab masing-masing individu memiliki pemahaman dan kesadaran yang berbeda. Apalagi tingkat intelektualitas, latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal turut menjadi faktor pendorong atas perbedaan-perbedaan tersebut. Namun, secara umum perbedaan-perbedaan itu tidaklah mengakibatkan pada suatu kondisi yang

[9] KPU Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarah pada sifat destruktif. Artinya warga Kabupaten Mojokerto telah mulai memahami demokrasi dengan menghargai perbedaan-perbedaan pilihan politik masing-masing individu.

Lain halnya dengan Pemilihan Umum Bupati Tahun 2010 yang baru saja terlaksana di Kabupaten Mojokerto, suasana pertikaian dan konflik menjadi suatu tontonan yang sebenarnya tidak pantas terjadi. Konflik antar pendukung, pembakaran fasilitas-fasilitas pemerintahan, dan demontstrasi massa yang anarkis adalah suatu bentuk ketidak puasan atas penyelenggaraan pemilu. Tetapi pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Mojokerto meskipun ada gejolak atau riak-riak kecil yang muncul tidaklah membuat hasil dari pelaksanaan pemilu berubah atau masyarakat menjadi risau. Terbukti sampai dengan saat ini hasil pemilihan umum 2009 diakui secara *legitimate* oleh semua pihak dan semua pihak menerima dengan lapang dada.

Berikut ini data perolehan suara partai-partai politik dalam pemilu 2009.

Tabel. 6.

Daftar Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2009

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi	%	Perolehan suara	%
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	4,44%	22.926	4,31%
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2	4,44%	21.867	4,11%
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	-	-	4.017	0,75%
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	-	-	4.832	0,91%
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	4,44%	26.093	4,90%
6.	Partai Barisan Nasional	-	-	12.885	2,42%
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	2.117	0,40%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Partai Keadilan Sejahtera	4	8,89%	26.793	4,90%
9.	Partai Amanat Nasional	3	6,67%	27.519	5,17%
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-	-	739	0,14%
11.	Partai Kedaulatan	-	-	-	-
12.	Partai Persatuan Daerah	-	-	519	0,10%
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	11,11%	55.470	10,42%
14.	Partai Pemuda Indonesia	-	-	516	0,10%
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	-	-	1.388	0,26%
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	-	-	4.172	0,78%
17.	Partai Karya Perjuangan	-	-	-	-
18.	Partai Matahari Bangsa	-	-	458	0,09%
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	-	-	-
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	-	-	972	0,18%
21.	Partai Republika Nusantara	-	-	962	0,18%
22.	Partai Pelopor	-	-	5.745	1,08%
23.	Partai Golongan Karya	5	11,11%	49.189	9,24%
24.	Partai Persatuan Pembangunan	3	6,67%	37.763	7,10%
25.	Partai Damai Sejahtera	-	-	1.792	0,34%
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	-	-	200	0,04%
27.	Partai Bulan Bintang	3	6,67%	40.839	7,67%
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	15,56%	79.063	14,86%
29.	Partai Bintang Reformasi	-	-	3.855	0,72%
30.	Partai Patriot	1	2,22%	6.367	1,20%
31.	Partai Demokrat	5	11,11%	61,514	11,56%
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	-	-	-
33.	Partai Indonesia Sejahtera	-	-	739	0,14%.
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3	6,67	22.175	4,17%
35.	Partai Merdeka			4.759	0,89%
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	-	-	-
37.	Partai Sarikat Indonesia	-	-	-	-
38.	Partai Buruh		-	3.895	0,73%
Jumlah		**45**	**100%**	**532.140**	**100%**

Sumber: KPU Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PARTISIPASI ELIT POLITIK PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas tentang partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto. Dalam tema tersebut memiliki tiga kata kunci yaitu partisipasi politik, elit politik perempuan dan pemilu. Sebagaimana telah dikemukakan dalam rumusan masalah, bahwa pembahasan akan difokuskan dalam dua persoalan. *Pertama*, bagaimana bentuk partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto. *Kedua*, Apa motif elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto.

1. Bentuk Partisipasi Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto

a. Pemberian suara atau votting

Terbukanya demokrasi secara luas di Indonesia memberikan angin segar dalam perkembangan dinamika perpolitik bangsa ini. Salah satu indikatornya berjalannya suatu sistem politik secara demokratis dan untuk mengukur terleluasakannya partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah melalui pemberian suara secara langsung dalam pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan sosial mulai dari lembaga yang terkecil seperti keluarga, RT, sampai dengan lingkup berbangsa tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia senantiasa mengalami dinamika. Artinya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak dapat dihindari. Demikian juga dengan pilihan politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda dalam melihat setiap persoalan.

Berkaitan dengan pemilu 2009, perempuan di Kabupaten Mojokerto dalam menentukan pilihan politiknya telah mampu secara sadar dan mandiri untuk dapat menentukan pilihan politiknya. Perbedaan pilihan politik dalam keluarga ternyata tidak terlalu berdampak pada pola hubungan keluarga atau sampai menimbulkan konflik. Hal ini karena masing-masing anggota memiliki kesadaran dan pemahaman akan pilihan politik masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mufida sebagai berikut:

> "Keluarga saya sangat demokratis, pilihan saya dengan suami lain lho, saya milih dia karena dia seorang tokoh yang religious, yang bijaksana, terutama pintar juga dan santun menurut saya, tapi lain halnya dengan suami saya, dia tidak begitu menurut suami saya."[1]

Dalam memberikan suara para pemilih sebelumnya mendapatkan informasi dari media seperti media elektronik dan media cetak, namun ada

[1] Mufidah, *Wawancara,* Mojokerto 23 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga perempuan yang mendapatkan informasi tentang pilihan politiknya melalui diskusi-diskusi informal dan himbauan dari tokoh-tokoh partai politik. Dalam memberikan suara perempuan mendatangi tempat pemungutan suara dimana mereka terdaftar sebagai pemilih. Inilah letak perbedaan dalam sistem pemberian suara dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu setiap pemilih benar-benar tercatat sebagai individu yang memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap.

b. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif

Berdasarka UU Pemilu Tahun 2008 No. 10 bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik yang terkait dengan pencalonan anggota legislatif adalah setiap partai politik yang terkait dengan pencalonan anggota legislatif adalah setiap partai harus menyertakan calon perempuan sebanyak 30% dari keseluruhan calon yang diajukan.

Kebijakan yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Perempuan kini diberikan kesempatan lebih untuk turut terlibat dalam pencalonan sebagai anggota legislatif.

Gambaran data yang jelas mengenai keikutsertaan perempuan dalam proses pencalonan sebagai anggota legislatif adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 7

Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Partai Politik

(Pemilu 2009 Kabupaten Mojokerto)

No	Nama Partai Politik	Perempuan	Laki-laki	Total
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	11	17	18
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	8	14	22
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	2	6	8
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	5	7	12
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	16	23
6.	Partai Barisan Nasional	5	5	10
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	5	5
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18	34	52
9.	Partai Amanat Nasional	4	18	22
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	2	4	6
11.	Partai Kedaulatan	-	-	-
12.	Partai Persatuan Daerah	1	4	5
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13	25	38
14.	Partai Pemuda Indonesia	2	6	8
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	3	5	8
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	5	12	17
17.	Partai Karya Perjuangan	-	-	-
18.	Partai Matahari Bangsa	-	3	3
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	6	7	13
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	3	6	9
21.	Partai Republika Nusantara	5	9	14
22.	Partai Pelopor	2	5	7
23.	Partai Golongan Karya	11	22	33
24.	Partai Persatuan Pembangunan	13	23	36
25.	Partai Damai Sejahtera	4	7	11
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1	3	4
27.	Partai Bulan Bintang	8	33	41
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	31	42
29.	Partai Bintang Reformasi	4	7	11
30.	Partai Patriot	7	13	20
31.	Partai Demokrat	21	33	54
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	-	-
33.	Partai Indonesia Sejahtera	8	12	20
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	8	20	28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

35.	Partai Merdeka	8	10	18
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	-	-
37.	Partai Sarikat Indonesia	-	-	-
38.	Partai Buruh	7	16	23
Jumlah		**212**	**443**	**655**

Sumber: KPU Kabupaten Mojokerto

Berikut ini adalah tabel anggota legislatif terpilih hasil pemilu 2009:

Tabel. 8

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2009-2014

No	Nama	Nama Partai Politik	Keterangan
1.	H. Ismail Pribadi, SE.	PDIP	DAPIL 1
2.	H. Miadi	PDIP	DAPIL 2
3.	Sutoyo, SH, MM.	PDIP	DAPIL 3
4.	Agus Basuki, S. Sos.	PDIP	DAPIL 4
5.	Hj. Setia Puji Lestari, SE.	PDIP	DAPIL 4
6.	Sipon, S.Sos.	PDIP	DAPIL 5
7.	Yuni Sri Erdiana	PDIP	DAPIL 5
8.	Drs. Mustakim	Partai Demokrat	DAPIL 1
9.	Juma'ati	Partai Demokrat	DAPIL 2
10.	Ir. I Nyoman Endra Mahyudi	Partai Demokrat	DAPIL 3
11.	Nike Budiarti Indra Dewi, S.Pd.	Partai Demokrat	DAPIL 4
12.	R.M. Boedhi, SH.	Partai Demokrat	DAPIL 5
13.	H. Abdul Khoirul Fatah	Partai Golongan Karya	DAPIL 1
14.	Ali Maskut, S.IP, MM.	Partai Golongan Karya	DAPIL 2
15.	Hj. Any Mahnunah, SE, MM.	Partai Golongan Karya	DAPIL 3
16.	H. Subandi, SH.	Partai Golongan Karya	DAPIL 4
17.	Suwandi Kadir	Partai Golongan Karya	DAPIL 5
18.	Ayni Zuhro, SE, MM.	Partai Kebangkitan Bangsa	DAPIL 1
19.	H. Edy Susanto	Partai Kebangkitan Bangsa	DAPIL 2
20.	Drs. H. Heri Ermawan	Partai Kebangkitan Bangsa	DAPIL 3
21.	Drs. Syaiful Fuad	Partai Kebangkitan Bangsa	DAPIL 4
22.	H. Asmunir, SE.	Partai Kebangkitan Bangsa	DAPIL 4
23.	H. Putut Wahyudi	Partai Keadilan Sejahtera	DAPIL 1
24.	Drs. Muslihuddin	Partai Keadilan Sejahtera	DAPIL 3
25.	Makhfud Kurniawan Hidayat	Partai Keadilan Sejahtera	DAPIL 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

26.	Kurniawan Eka Nugraha, ST.	Partai Keadilan Sejahtera	DAPIL 5
27.	Darman	Partai Amanat Nasional	DAPIL 1
28.	Mohammad Santoso, SE.	Partai Amanat Nasional	DAPIL 2
29.	E. Suminto Adi, SE.	Partai Amanat Nasional	DAPIL 4
30.	Riduwan, SH, SE, MH.	Partai Persatuan Pembangunan	DAPIL 1
31.	Zainul Arifin, S.Ag.	Partai Persatuan Pembangunan	DAPIL 2
32.	Kusairin, S.IP.	Partai Persatuan Pembangunan	DAPIL 5
33.	Ir. H. Muhammad Fauzi, MM.	PKNU	DAPIL 2
34.	Salim Ashar, S.Ag, M.Si.	PKNU	DAPIL 3
35.	H. Saiful Amin, SE.	PKNU	DAPIL 4
36.	Hj. Titin Syafa'atin, S.Pd.	Partai Bulan Bintang	DAPIL 1
37.	Rochimatus Sholichah	Partai Bulan Bintang	DAPIL5
38.	Ahmad Zuliono	Partai Bulan Bintang	DAPIL 5
39.	Muhamad Syaikhu Subkhan	HANURA	DAPIL 1
40.	Senedi	HANURA	DAPIL 2
41.	Aji Mulyo Subagyo, S.IP.	GERINDRA	DAPIL 3
42.	Sujatmiko	GERINDRA	DAPIL 5
43.	Supardi, S.Ag.	Partai Karya Peduli Bangsa	DAPIL 2
44.	Sopii, SP.	Partai Karya Peduli Bangsa	DAPIL 5
45.	Wiwik Mamlukha, S.kom.	Partai Patriot	DAPIL 2

Sumber: KPU Kabupaten Mojokerto

Berikut ini adalah tabel anggota legislatif perempuan terpilih hasil pemilu 2009:

Tabel. 9

Anggota Legislatif Perempuan Terpilih

No	Nama	Asal Partai	Keterangan
1.	Hj. Setia Puji Lestari, SE.	PDIP	DAPIL 4
2.	Yuni Sri Erdiani	PDIP	DAPIL 5
3.	Juma'ati	Partai Demokrat	DAPIL 2
4.	Nike Budiarti Indra Dewi	Partai Demokrat	DAPIL 4
5.	Hj. Any Mahnunah, SE,MM.	Partai Golongan Karya	DAPIL 3
6.	Ayni Zuhro, SE, MM.	Partai Kebangkitan Bangsa	DAPIL 1
7.	Hj. Titin Syafa'atin, S.Pd.	Partai Bulan Bintang	DAPIL 1
8.	Rochimatus Sholichah	Partai Bulan Bintang	DAPIL 5
9.	Wiwik Mamlukha, S.Kom.	Paratai Patriot	DAPIL 2

Sumber: KPU Kabupaten Mojokert

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil pemilu tahun 2009 yang menempatkan 9 anggota perempuan di lembaga legislatif mengundang penilaian berbagai kalangan. Walaupun aturan kuota 30% perempuan di terapkan pada kenyataannya tetap saja tidak mampu mendongkrak perolehan kursi perempuan di legislatif. Hal ini dikarenakan sebagian besar partai politik menempatkan calon perempuan berada pada nomor bawah, sehingga kesempatan perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif menjadi kecil kemungkinannya. Mengenai hal tersebut salah satu informan mengungkapkan bahwa:

> "Keterwakilan perempuan di tiap-tiap partai yang mengajukan itu masih kurang, karena kebanyakan perempuan itu ditempatkan di nomor buntut atau kunci, jarang yang berada di nomor urut satu kalaupun ada biasanya mereka adalah orang-orang yang lama berkecimpung di partai politik tersebut, jadi bukan orang-orang baru. Tapi saya membuktikan walaupun saya orang baru yang berkecimpung di dunia politik, pada saat itu saya mendapatkan nomor urut 3 dan saingan saya orang-orang lama yang ada di partai. Buktinya... saya bisa terpilih menjadi anggota legislatif, karena itu semua kembali lagi ke masyarakat yang memilih dan menilai kita. Apakah layak untuk dipilih?"[2]

Selain itu pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif tidak lepas dari peran partai politik sebaga penentu kebijakan, bagaimanapun juga partai politik merupakan pemegang otoritas dan memutuskan calon-calon yang akan diajukan. Seperti yang diungkap oleh salah seorang pengurus partai politik Bapak Heriyanto yang mengungkapkan sebagai berikut:

---

[2] Ainy Zuhro, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Mei 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kemarin ada cuma kita tidak menempatkan beliau sebagai calon utama, ya…karena sekali lagi posisi rijal itu dalam arti orang yang punya kekuatan dalam hal ini kami masih melihat bahwa laki-laki masih besar, sehingga kemarin kami lebih mengutamakan laki-laki yang nomor satu."[3]

Mengenai pertimbangan-pertimbangan partai dalam menentukan calon legislatif tidak bisa diputuskan secara sekelompok orang saja, namun juga memperhatikan aspirasi yang berkembang dari kalangan bawah (*Grass Root*). Hal ini dipertegas dipertegas lagi oleh Bapak Heriyanto bahwa:

> "Kami tidak bisa menentukan sendiri, bahkan ketika kita memutuskan siapa yang akan menjadi calon. Maka seluruh kader kita kumpulkan atau kita minta aspirasi kader disuruh untuk memilih siapa yang akan menjadi calon anggota dewan dengan adanya pemilu internal, terus dilihat suara terbesar dan disyurohkan, dirapatkan dengan majelis pertimbangan dan memutuskan siapa yang jadi calon. Disini perempuan juga menentukan, karena sebagian besar kader kita perempuan mereka paham sekali siapa yang harus jadi pemimpin."[4]

Selain partai dan keinginan kuat dari individu yang mencalonkan, dukungan masyarakat juga menjadi penentu dalam memberikan penilaian atas pencalonan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Dengan begitu perempuan tersebut layak mendapat amanah atau tidak, bagaimana dukungan masyarakat atas pencalonan perempuan dalam pemilu tahun 2009. Salah seorang kontestan anggota legislatif Ibu Setia Puji Lestari mengungkapkan sebagai berikut:

---

[3] Heriyanto, *Wawancara*, Mojokerto 28 April 2010.
[4] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah mulai pintar-pintar ya... dalam menentukan pilihannya. Apalagi saya sudah cukup lama juga terjun kedunia politik, mulai tahun 1997 saya sudah berkarir di dunia politik. Jadi saya tidak terlalu susah untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, karena kebanyakan masyarakat sudah mengenal saya." [5]

Meskipun statusnya sebagai perempuan bukan berarti dalam pencalonan anggota legislatif tidak memiliki strategi untuk menarik simpati massa justru dengan statusnya tersebut Ibu Setia Puji Lestari merasa mamiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan kontestan dari kalangan laki-laki. Berikut ini adalah penuturannya:

> "Justru karena saya seorang perempuan, itu kalau bagi saya sebuah kelebihan. Apalagi para perempuan (Ibu) itu yang paling sering mempunyai kegiatan atau perkumpulan. Misal, dalam acara yasinan/tahlil, imunisasi, dan pertemuan dengan masyarakat, di situ saya selalu ikut berperan di dalamnya. Dengan begitu pendukung saya juga kebanyakan para Ibu, dan jangan salah lho ya, perempuan itu adalah managemen rumah tangga yang baik."[6]

c. Kampanye

Salah satu kegiatan yang memberikan nilai lebih dari sekian proses dalam tahapan pemilu adalah kampanye. Hal ini disebabkan karena dalam kampanye setiap partai politik dan calon anggota legislatif berusaha dengan maksimal mengerahkan dengan segenap potensi dan kreatifitas dalam menarik simpati massa.

---

[5] Setia Puji Lestari, *Wawancara*, Mojokerto 15 Mei 2010.
[6] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada berbagai ragam cara yang dilakukan oleh partai-partai politik maupun calon dalam menarik perhatian umum seperti konvoi, panggung terbuka, pemberian bantuan dalam bentuk sembako maupun bangunan fisik, dan juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah dan keagamaan seperti diskusi terbuka dan pengajian. Kampanye yang diikuti oleh perempuan di Kabupaten Mojokerto tidak jauh berbeda seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki pada umumnya.

Para perempuan juga aktif sebagai juru kampanye yang menyampaikan dan menghimbau agar para warga masyarakat memilih partai politik yang menjadi pilihannya, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Inasah sebagai berikut:

> "Awalnya saya ajak bagaimana mensikapi pemilu, bagaimana pilihan politiknya, kemudian saya berusaha untuk memberikan masukan tentang pemimpinnya, tentang bagaimana partai politiknya, tentang kerja-kerja nyata dari partai politik tersebut."[7]

d. Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum

Dalam pemilu tahun 2009 penyelenggarannya dilakukan oleh komisi pemilihan umum yang terdiri atas orang-orang independen artinya bukan berasal dari partai politik. Komisi pemilihan umum Kabupaten Mojokerto sebagai penanggung jawab penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten memiliki anggota 5 orang dan 1 di antaranya adalah seorang perempuan seperti yang terlihat pada tabel 10 berikut ini:

---

[7] Inasah Mu'asomah, *Wawancara,* 20 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 10

Daftar Nama Anggota KPU Kabupaten Mojokerto

No	Nama	Asal Partai
1.	Didik Hendro Puspito	Ketua
2.	Emmy Rachmawati	Anggota
3.	Nanang Supriyadi	Anggota
4.	M. Syarif Kholili, S.Pdi, M.Pdi	Anggota
5.	Rusman Arif, SH.	Anggota

Sumber: KPU Kabupaten Mojokerto

Keikutsertaan perempuan sebagai anggota komisi pemilihan umum patut menjadi kebanggaan bagi kita semua. Mengingat perempuan yang selama ini seringkali distigmatisasi sebagai *konco wingking*[8] bagi kaum laki-laki ternyata mampu menunjukkan kemampuan dan potensinya yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Hal ini terlihat dari kerja-kerja produktivitas yang dilakukan oleh anggota KPU dari kalangan perempuan ini pada dasarnya sama seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki, mengingat didalam KPU yang menjadi landasan kerja anggota bukanlah jenis kelamin melainkan profesionalisme kerja akan hak dan tanggung jawab. Seperti yang diungkapkan oleh saudari Emmy salah seoarang anggota KPU yang bertugas didevisi pendaftaran pemilih dan pemungutan suara bahwa:

[8] Konco wingking artinya teman yang mengurusi masalah-masalah rumah bagian belakang yang terkait dengan urusan dapur, karena urusan dapur menurut tradisi jawa identik dengan hal yang remeh dan sepele.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Walaupun saya seorang perempuan, saya tidak pernah dianggap sebagai *konco wingking* oleh partner kerja saya. Karena disini kami lebih mengutamakan profesionalisme dalam bekerja, artinya lebih kepada bagaimana kita bisa bekerja sama menyelesaikan tanggung jawab kita."[9]

Dengan kedudukanya sebagai perempuan tidak berarti Emmy menjadi sosok yang lemah. Hal ini ia buktikan dengan semangat kerjanya yang begitu antusias dalam melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti dalam penuturannya:

> "Saya juga pernah lembur seharian memeriksa rekapan data-data tentang pemilu, sementara teman-teman laki-laki telah tidur, dan saya sendiri duduk manis aja di kursi kerja menyelesaikan pekerjaan saya. Artinya saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh teman saya yang laki-laki"[10]

Senada dengan apa yang diungkapkan saudara Emmy, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto mengungkapkan bahwa:

> "Sosok perempuan itu menurut saya, lebih teliti dalam kontek-kontek tertentu. Misalnya dalam megerjakan tugasnya, perempuan itu lebih detail dan tidak pernah mengeluh atas pekerjaannya (*gak neko-neko*). Karena dia sadar akan tanggung jawab yang diembannya."[11]

Keberadaan perempuan juga membawa pengaruh bagi perubahan paradigma berfikir di lngkungan masyarakat terhadap keberadaan sosok perempuan di wilayah publik kini mulai dihargai. Artinya masyarakat

---

[9] Emmy Rachmawati, *Wawancara*, Mojokerto, 16 April 2010.
[10] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap sosok perempuan juga mampu dan memiliki potensi sebagai pemimpin.

e. Menjadi Saksi dalam Kegiatan Pemilu

Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 10 Tahun 2009 tentang tahapan-tahapan pemilihan umum yang salah satunya adalah mengenai pemungutan dan penghitungan suara, maka setiap partai politik diberikan kesempatan untuk mengirimkan saksi dalam proses tersebut. Dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, di Kabupaten Mojokerto sendir iketerlibatan perempuan sebagai saksi juga turut mewarnai. Hampir di sebagian besar TPS di Kabupaten Mojokerto tidak luput dari adanya unsur perempuan sebagai saksi dan pementau.

Secara struktural perempuan ini bukanlah pengurus yang ditugaskan secara khusus oleh partai melainkan mereka hanyalah sebagai relawan yang dengan sukarela mau menjadi saksi dan pemantau dalam pemilu 2009. Umumnya mereka adalah perempuan-perempuan muda yang memiliki semangat dan idealisme yang kuat dalam mengawal proses pelaksanaan pemilu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari Mega sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saya menjadi saksi relawan dalam pemilu itu dengan sukarela, saya kan tidak ingin terjadi kecurangan dalam pemilu tersebut karena setiap orang menginginkan partainya menang."[12]

Senada dengan apa yang diungkapkan diatas Bapak Heriyanto salah seorang pengurus partai politik mengungkapkan tentang keterlibatan perempuan sebagai saksi sebagai berikut:

> "Ya... banyak sekali di setiap TPS, kita menempatkan kader perempuan sebagai saksi di sana. Hampir di seluruh TPS Kabupaten Mojokerto kita tempatkan kader perempuan sebagai saksi, sifatnya mereka adalah sukarela dan kader kita sudah paham apa yang harus dilakukan , jadi mereka melaksanakan itu dengan tanggung jawab."[13]

f. Menjadi Anggota Partai Politik

Pintu demokrasi yang terbuka lebar di era reformasi membawa dampak yang signifikan pada pola dan aktifitas-aktifitas politik masyarakat Kabupaten Mojokerto. Di zaman orde baru masyarakat hanya dapat mengikuti salah satu dari 3 macam partai yakni golkar, PPP dan PDI. Maka saat ini masyarakat dapat memilih aktifitas politiknya pada 38 partai yang tersedia.

Dengan adanya beragam pilihan politik yang tersedia, masyarakat Kabupaten Mojokerto khususnya para kaum perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam bidang politik melalui partai politik baik sebagai anggota pasif maupun sebagai anggota aktif. Keberadaan 38

---

[12] Mega Silfia Oktaviani, *Wawancara,* Mojokerto 22 April 2010.
[13] Heriyanto, *Wawancara,* Mojokerto 28 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai politik di Kabupaten Mojokerto tidak dapat dipisahkan dari adanya kontribusi perempuan didalamnya. Hampir semua kepengurusan diseluruh partai politik di Kabupaten Mojokerto ada unsur perempuannya.

Secara struktur organisasi partai terdiri atas majelis pertimbangan partai dan pengurus harian. Jumlah pengurus harian untuk masing-masing partai tidaklah sama karena berkisar antara 14-18 orang dan hampir 20% dari semua pengurus harian dari unsure perempuan. Sebagaimana yang iungkapkan oleh salah satu pengurus partai politik Bapak Heriyanto yang menyampaikan bahwa:

> "Di dalam partai kami ada departemen khusus yakni departemen pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat yang mana berfungsi sebagai media aspirasi perempuan dan pengkaderan perempuan. Bagi partai kami perempuan itu sangat penting karena perempuan adalah pilar negara, sehingga perempuan perlu diberdayakan. Sehingga salah satu hal yang dibutuhkan oleh partai kami departemen pmberdayaan perempuan memilki nilai positif".[14]

Keberadaan perempuan dalam kepengurusan partai politik bukan hanya menjadi pelengkap atau pemanis partai saja, melainkan perempuan juga turut terlibat dalam aktivitas-aktivitas kepartaian. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Khoirun Nisak salah seorang pengurus dari kalangan perempuan dalam partai politik sebagai berikut:

---

[14] Heriyanto, *Wawancara*, Mojokerto 28 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Karena memang spesifikasi saya di kehumasan, publik relation, maka keterlibatan saya lebih banyak dalam forum-forum diskusi seminar, kemudian dokumentasi media dan analisa data "[15]

Keberadaan perempuan sebagai pengurus partai tidak menjadikan kinerja-kinerja partai menjadi lemah atau berkurang produktifitasnya. Justru perempuan pada sisi-sisi tertentu memiliki kelebihan yang lebih daripada laki-laki. Tentang kinerja dan kontribusi perempuan sebagai pengurus partai Ibu Nur Farida mengungkapkan bahwa:

> "Kontribusi perempuan dalam hal pengkaderan terutama perempuan menurut saya mempunyai talenta pengkaderan yang bagus. Jadi partai kita ini memang perempuan sangat banyak karena memang memiliki semangat yang luar biasa. Perempuan ini bermain perasaan dan yang muncul dari pengurus-pengurus kami adalah semangat untuk memperjuangkan partai kita"[16]

2. Motif Elit Politik Perempuan Berpartisipasi Politik dalam Pemilu 2009

Di dalam berpartisipasi politik perempuan tidak terlepas dari motif-motif yang menjadi dorongan atas keterlibatan di dalamnya. Motif perempuan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tahun 2009 bisa disebabkan karena dorongan dari dalam dirinya sendiri maupun juga disebabkan oleh faktor dari luar.

---

[15] Khoirun Nisak, *Wawancara*, Mojokerto 21 April 2010.
[16] Nur Farida, *Wawancara*, Mojokerto 29 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu bagi sebagian besar masyarakat telah dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara yang baik. Dengan berpartisipasi memberikan suara dalam pemilu setidaknya ada kontribusi dan harapan masyarakat akan kemajuan negeri ini. Hal ini kemudian menjadi suatu bentuk motivasi dalam diri seseorang untuk memberikan suara dalam pemilu.

Pilihan politik masyarakat merupakan suatu cerminan atau refleksi akan harapan-harapan yang diinginkan terutama perubahan ke arah perbaikan bangsa. Sejak era reformasi digulirkan telah lima kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Namun dari semuanya itu stabilitas politik nasional hingga saat ini masih belum tertata dengan baik meskipun semangat demokrasi semakin meningkat. Keinginan, harapan, dan kerinduan akan perbaikan kemudian terelaborasi menjadi motivasi nilai dan keyakinan seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

Orientasi agama dan pemimpin tampak dalam pilihan politik perempuan di Kabupaten Mojokerto. Walaupun tidak menjadi pemenang pemilu setidaknya partai-partai Islam dalam perolehan suara mendapatkan hasil yang signifikan. Seperti yang terlihat pada tabel 6 Bab III.

Orientasi agama dan pemimpin dalam pemilu tahun 2009 juga terlihat dalam wawancara dengan saudari Nur Farida yang mengungkapkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Saya memilih partai ini karena manajemen partai dan juga pemimpin yang ada di dalam partai, yang saya lihat akhlaknya terutama memang beberapa orang yang ada di partai ini sudah menduduki jabatan struktural di pemerintahan dan itu sudah terbukti walaupun tidak bombastis ya namanya dan manajemen partai sendiri bisa dilihat kerja-kerja nyatanya."[17]

Senada dengan apa yang di ungkapkan di atas responden yang lain yakni Ibu Khoirun Nisak juga mengungkapkan bahwa figur bijaksana, wawasan luas, dan pintar menjadi dasar dalam menentukan pilihan politiknya.

B. Pembahasan Tentang Partisipasi Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto

1. Elaborasi bentuk partisipasi elit politik perempuan

Membahas tentang bentuk partisipasi politik maka tidak bisa lepas dari landasan teori yang menjadi pijakannya. Ada beberapa teori atau pandangan dari tokoh-tokoh yang relevan diantaranya Rush dan Althof, Almond Verba, Roth dan Wilson, Milbrath, dan Surbakti. Namun dalam hal ini peneliti akan berpijak pada dua landasan saja. *Pertama,* pendapat dari Rush dan Althof[18] bahwa partisipasi politik dapat mengambil bentuk mulai dari menduduki jabatan politik atau administrasi dalam organisasi sedemikian rupa sampai kepada voting atau pemberian suara sebagai bentuk paling bawah dari partisipasi politik. Tidak terdapat perbedaan yang tajam di dalamnya, dan orang boleh bergerak dari keadaan yang satu dengan keadaan yang lain.

---

[17] Nur Farida, *Wawancara*, Mojokerto 29 April 2010.

[18] Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik,* alih bahasa Kartini Kartono, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara itu, pendapat *kedua* adalah Roth dan Wilson dalam Budiardjo[19] menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara.

Dengan mengelaborasi kedua pendapat di atas dan berdasarkan hasil penelitian, maka bentuk partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto ditunjukkan dalam berbagai bentuk, antara lain memberikan suara dalam pemilu, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mengikuti kampanye, menjadi anggota penyelenggara pemilu, dan menjadi anggota partai politik.

---

[19] Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

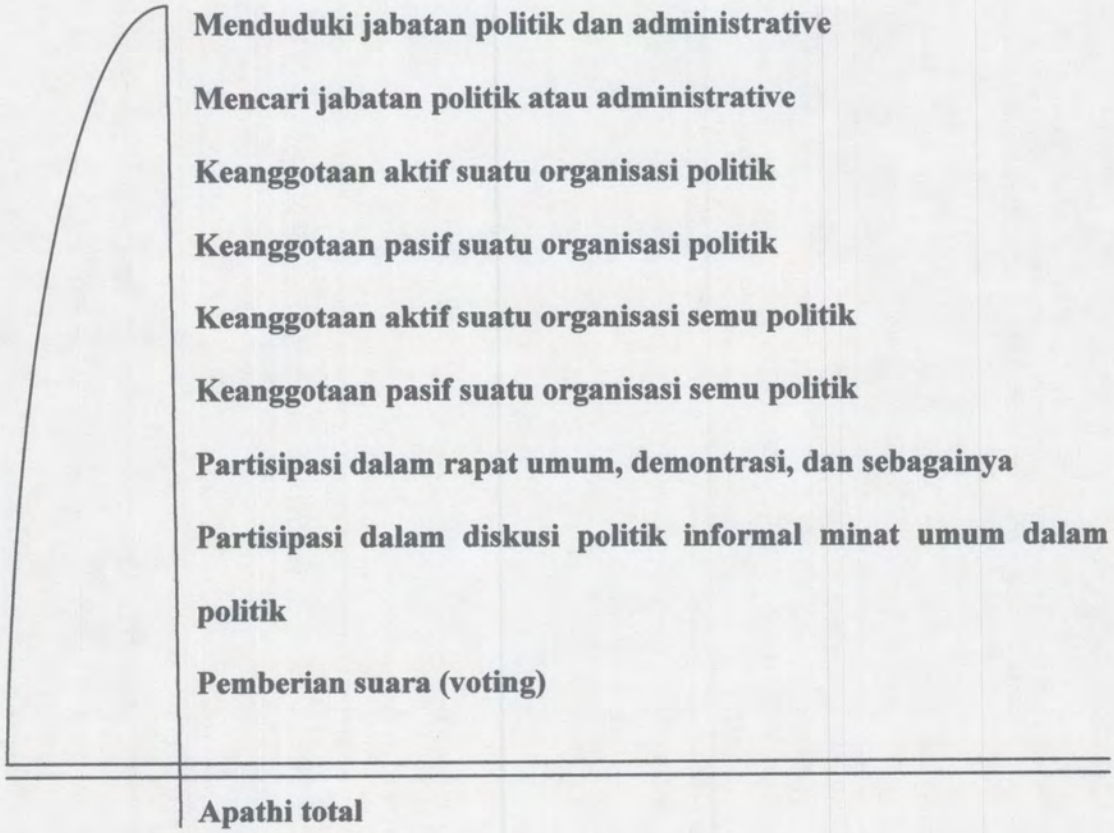

Hierarki partisipasi politik menurut Rush dan Althoff

Piramida partisipasi politik menurut Roth dan Wilson

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

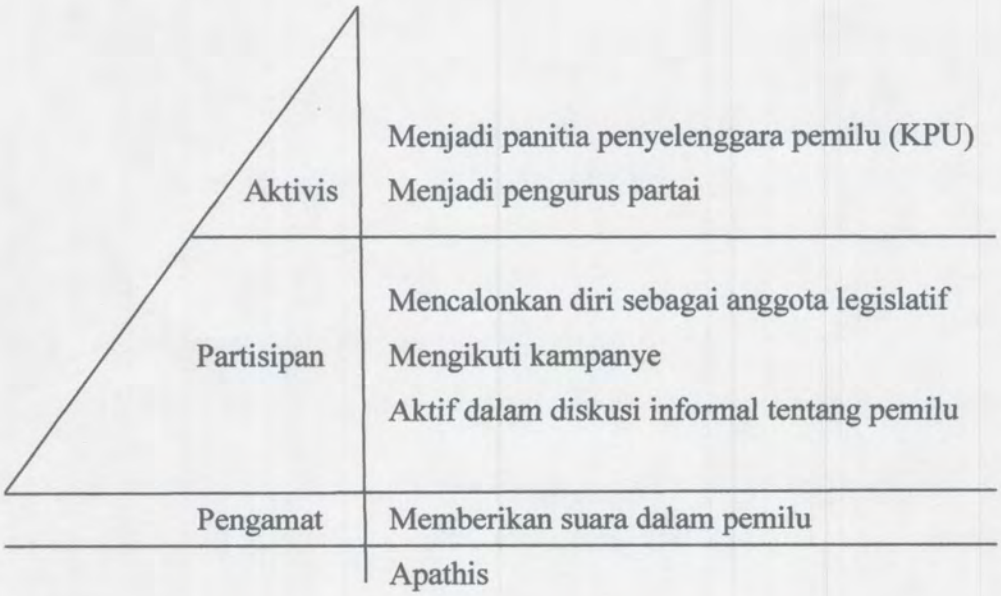

Elaborasi partisipasi politik elit politik perempuan

Mengelaborasikan kedua bentuk partisipasi politik di atas dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam memahami partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat pendapat keduanya dapatlah dijelaskan bahwa dalam pemilu di Kabupaten Mojokerto pun terbentuk semacam hierarki partisipasi elit politik perempuan. Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang memegang jabatan politik atau administrasi dalam hal ini adalah KPU dan pengurus partai selanjutnya kategori ini dinamakan dengan aktivis.

Kasus Ibu Emmy dan Ibu Nisak adalah contoh elit politik perempuan yang melibatkan diri dalam organisasi politik dengan memegang tugas dan tanggung jawab yang memberikan banyak pengaruh kepada individu lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem politik. Sebagai anggota KPU Ibu Emmy seringkali berurusan dengan masalah pendaftaran dan penghitungan suara, berurusan dengan partai politik dan para pemilih-pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Dalam pelaksanaan tugasnya ia menjelaskan bahwa ketika di awal-awal masa pemilihan umum berlangsung, ia pernah di tugaskan untuk memverifikasi partai politik sebelum di sahkan sebagai kontestan pemilu di Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya Ibu Emmy juga menjelaskan tentang pengalamannya dalam menangani para demonstran yang tidak puas dengan keputusa-keputusan KPU. Sebagai anggota KPU perempuan ternyata memberikan suatu nilai lebih dalam kedudukannya, sebab demonstran yang secara umum adalah mayoritas laki-laki tentu menjadi risih dalam menghadapi perempuan.

Kasus yang kedua adalah Ibu Nisak bahwa sebagai pengurus partai ia memegang jabatan di bidang kehumasan atau *public relation.* Bentuk partisipasi politik yang ia lakukan selama menjadi pengurus partai adalah menghadiri forum-forum diskusi, seminar, konferensi pers, *phone friend*, melakukan dokumentasi media dan analisa media.

Jenjang kedua dari hierarki partisipasi politik adalah partisipan diuraikan dalam bentuk pencalonan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti kampanye. Data dari KPU Kabupaten Mojokerto rekapitulasi daftar calon anggota legislatif menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi anggota legislatif terpilih dari 38 partai politik berjumlah 9 orang dari 45 kursi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota dewan. Jumlah ini ternyata belum mencapai kuota 30% seperti yang tertuang dalam Undang-undang pemilu No.10 tahun 2008. Meskipun belum mencapai 30% bukan berarti partisipasi politik perempuan secara umum itu rendah. Hal ini dikarenakan bahwa dalam partisipasi politik ada banyak variabel yang dijadikan sebagai titik tolak dalam mengukur partisipasi. Lagi pula pencalonan sebagai anggota legislatif bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi politik. Seperti apa yan ditegaskan oleh Huntington dan Nelson bahwa pemberian suara bukanlah satu-satunya ukuran untuk mengukur tingkat partisipasi politik.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalam partisipasi politik ada banyak variable yang menjadi benang merah sebelum menarik suatu kesimpulan. Selain mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dijenjang partisipan juga dapat diuraikan bentuk partisipasi politik perempuan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa partisipasi elit politik perempuan ditunjukan dalam bentuk aktif dalam diskusi-diskusi informal mengenai pemilu yang akan menentukan preferensi politiknya.

Adapun keterlibatan elit politik perempuan dalam kampanye ditunjukkan dengan kesertaan mereka, bahwa mereka juga mengikuti kampanye dalam bentuk pawai, konvoi, dan kampanye terbuka. Rush dan Althoff menegaskan penting untuk disadari "bahwa partisipasi pada satu hierarki tidak merupakan satu prasyarat bagi partisipasi tertentu". Pendapat ini relevan sekali ketika melihat konteks partisipasi politik perempuan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu Kabupaten Mojokerto bahwa bentuk partisipasi seseorang tidaklah mengalami kemandegan pada satu jenjang tertentu saja. Bila melihat hasil penelitian dapatlah ditarik satu benang merah yang menjelaskan bahwa pada saat yang sama seseorang selain menjadi pengamat juga menjadi partisipan dan aktivis.

2. Motif Elit Politik Perempuan Berpatisipasi Politik

Terleluasakannya partisipasi politik dalam pemilu 2009 tentu tidak terjadi secara serta merta, sekalipun partisipasi politik di Indonesia menganut paham demokrasi yang mempunyai akar ideolgis bahwa rakyat menjadi faktor penting bagi tegaknya partisipasi politik.

Dalam konteks pemilu tahun 2009 kesertaan pemilu didalamnya merupakan suatu proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan itu menerima sejumlah orientasi dan nilai-nilai tentang pemilu. Dalam bahasa Rush dan Althoff[20] disebut dengan sosialisasi politik, yakni suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalamannya.

---

[20] Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi...*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Rush dan Althoff juga mengungkapkan bahwa partisipasi politik tidak akan terjadi tanpa adanya sosialisasi politik.[21] Dalam hal ini orientasi dan motif individu merupakan suatu bentuk kristalisasi nilai yang didapatkan individu dari lingkungan dan pengalamannya. Tentang motif ini, Jalbi mengungkapkan bahwa keyakinan agama yang diimani oleh individu merupakan salah satu dorongan kuat dalam diri individu yang terbangun dari sejumlah nilai-nilai yang didapatkan dari pengalaman di lingkungan kehidupannya.[22]

Seperti yang dilakukan oleh Ibu Mufida bahwa ia menjadi saksi dalam pemilu dengan alasan menginginkan adanya penyelamatan partai dari bentuk kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penghitungan suara. Tindakan seseorang dalam menjadi saksi di pemilu merupakan suatu bentuk tindakan objektif yang didasari atas rasionalitas pengalaman subyek. Pernyataan ini mengukuhkan pandangan Weber yang menyebutkan bahwa seseorang bertindak karena adanya motif.[23] Salah satunya adalah motif yang rasional bernilai. Motif rasional bernilai merupakan motif yang didasarkan atas penerimaan seseorang secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.

---

[21] Ibid..., 120.

[22] Ustman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin,* (Solo: Era Intermedia, 2000), 101-102.

[23] Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi...,* 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa lain, Lane menyebutnya sebagai fungsi untuk mengejar nilai-nilai khusus.[24] Soal nilai-nilai ini juga, Ibu Farida beralasan bahwa keaktifannya di partai politik sebagai pengurus partai merupakan suatu bentuk manifestasi keimanan terhadap tuhan, dalam arti bahwa partai merupakan salah satu sarana dalam mendapatkan keridhaan Tuhan, selain itu ia juga merasakan kepuasan batin karena dapat memberi kemanfaatan bagi orang lain. mempertegas hal ini Bapak Heriyanto sebagai salah seorang pengurus partai juga mengungkapkan bahwa aktivitas elit politik perempuan di dalam partai maupun pemilu diterjemahkan sebagai suatu bentuk peribadatan kepada Tuhan, dengan partai sebagai sarananya.

Fakta sosial yang terhidang dalam pemilu tahun 2009 di Kabupaten Mojokerto menunjukkan betapa masih kuatnya budaya feodalisme dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu tersebut dapat di baca bahwa preferensi politik elit politik perempuan masih dipengaruhi oleh keberadaan figur kharismatik di dalam partai politik sebut saja seperti Gus Dur dan Amin Rais. Bagi kalangan NU dan Muhammadiyah, keduanya merupakan sosok yang begitu penting dan mampu memberi sugesti dalam menentukan pilihan politik.

Seperti dalam penuturan Ibu Farida yang menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk terlibat didalam partai politik tersebut, karena tokoh partai tersebut merupakan sosok yang religius, pintar dan bijaksana dan merupakan

[24] Ibid..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh besar dalam golongan keagamaannya. Sedangkan Ibu Khoirun Nisak memilih untuk terjun ke partai politik yang berasaskan nasionalisme karena sesuai dengan ideologinya, dikuatkan lagi karena orang tuanya juga merupakan pengurus partai.

Fenomena di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Kabupaten Mojokerto masih dipengaruhi oleh orientasi pemimpin dan keberagamaan. Pemimpin dan agama juga merupakan faktor penting dalam pembentukan perilaku pemilih. Tingkah laku pemilih tersebut oleh Milbrath dan Goel, dinyatakan sebagai suatu bentuk kondisi yang berkenaan dengan perangsang politik. Dimana keterbukaan dan kepekaan seseorang melalui organisasi-organisasi keagamaan memberikan semacam dorongan bagi elit politik perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tetapi Weber justru memberikan pandangan bahwa tindakan elit politik perempuan yang demikian merupakan suatu tindakan yang berangkat dari emosi dan perasaan atau dinamakan dengan tindakan afektual emosional.

Selain orientasi pemimpin dan agama partisipasi elit politik perempuan Kabupaten Mojokerto juga berangkat dari kesadaran diri yang kuat untuk mengaktualisasikan kemampuan dan harapan-harapannya terhadap suatu sitem politik. Seperti yang dialami oleh saudari Emmy di KPU bahwa motif ia bergabung sebagai anggota KPU karena ia ingin mengerti dan memahami bagaimana bekerja dan berhubungan langsung dengan pihak-pihak birokrasi serta partai politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut diatas sesuai dengan pandangan Surbakti juga bahwa motif partisipasi politik seseorang berangkat dari adanya kesadaran politik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ia menambahkan bahwa kesadaran politik merupakan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.[25]

Selain itu pandangan Jalbi tentang motif partisipasi politik perempuan dapat dijadikan sebagai alat analisis dalam melihat bentuk partisipasi elit politik perempuan. Sebagaimana yang Jalbi ungkapkan bahwa kultur dan karakter lingkungan politik juga memberikan dorongan positif seseorang untuk memilih suatu bentuk partisipasi politik. [26]

Dengan demikian memposisikan sebagai aktivis, partisipan, dan pengamat tidak dapat kita pisahkan dari sejumlah variabel yang ada. Keyakinan, kultur, dan lingkungan politik memiliki keterikatan satu sama lain dalam menentukan bentuk dan motif partisipasi elit politik perempuan.

---

[25] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 144.

[26] Ustman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik...*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik elit politik perempuan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan intensitasnya terbagi dalam tiga bentuk yakni sebagai pengamat, partisipan, dan aktivis. Dimana perempuan sebagai pengamat ditunjukkan dalam bentuk pemberian suara. Sedangkan elit politik perempuan sebagai partisipan ditunjukkan dalam bentuk menjadi peserta kampanye, juru kampanye, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terlibat dalam diskusi-diskusi informal. Elit politik perempuan sebagai aktivis yaitu ditunjukkan dengan menjadi panitia penyelenggara pemilu dan menjadi pengurus partai.
2. Motif partisipasi politik elit politik perempuan di kabupaten Mojokerto dalam pemilu legislatif tahun 2009 adalah motif rasional bernilai dan keikutsertaan mereka dengan berpartisipasi atas dasar pertimbangan rasional. Sebagian elit politik perempuan telah menilai secara objektif pilihannya dalam arti memiliki kesadaran diri dan sebagian lainnya mengandung motif yang afektual emosional yaitu akibat penilaian terhadap agama serta partai politik yang dipilih merupakan suatu bentuk kristalisasi nilai yang didapatkan dalam lingkungan politiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Elit politik perempuan lebih meningkatkan kualitas diri lagi agar dapat melakukan banyak peran terutama peran-peran di wilayah publik yang justru banyak bersinggungan dengan kepentingan perempuan itu sendiri.
2. Elit politik perempuan perlu mengambil bagian secara lebih luas lagi dengan memberikan kontribusi lebih karena statusnya di tengah masyarakat telah diakui sebagai sosok yang mampu dan mempunyai potensi dalam bidang politik khususnya.
3. Para elit politik perempuan bersama-sama dengan pemerintah, organisasi sosial masyarakat, partai politik, dan tokoh-tokoh politik hendaknya dapat bekerjasama dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan agar peningkatan partisipasi politik masyarakat dapat lebih berkualiatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara,* Alih Bahasa Sahat Simamora, Jakarta: Bumi Angkasa.

Agustina, Heriyani dkk, 2009. *Gender and Politics*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Budiarjo, Miriam. 1995. *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour. 2005. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi, Krishno dkk. 2006. *Perilaku Partai Politik*, Malang: UPT UMM Press.

Haricahyono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Alih bahasa Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta.

Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala.

Kamaruddin. 2003. *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, Jakarta: Visi Publishing.

Keller, Suzzane. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peran Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, Alih bahasa Zahara D. Noer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maran, Raga Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marcridis, Roy C. dan Brown, Benard E. 1992. *Perbandingan Politik*, Alih bahasa A.R. Henry Sitanggang, Jakarta: Erlangga.

Miles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data kualitatif*, Jakarta: UI Press.

Moelong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulia, Siti Musdah. 2005. *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Naqiyah, Najlah. 2005. *Otonomi Perempuan*, Malang: Bayumedia Publishing.

Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. 1997. *Metodologi Penelitian Cet. I* Jakarta: Bumi Aksara.

Nasir, M. 1999. *Metode Penelitian,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel. 2002. Surabaya: Fakultas Ushuluddin.

Rahman, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*: Dalam Perspektif Struktural Fungsional Surabaya: Penerbit SIC kerjasama dengan LPM IKIP Surabaya.

Rasyid Ridha, Muhammad. 2004. *Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat, Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik*, Bandung: Penerbit Hikmah.

Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih bahasa Kartini Kartono, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia.

Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.

Satori, Djama'an. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suyanto, Bagong dkk. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tong, Rosemarie Putnam. 1996. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komperhensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, alih bahasa Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra.

Undang-Undang Pemilu. 2008. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Widyani Soejtipto, Ani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas.

Undang-undang

Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik.

Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bahwa partai yang berhak mengikuti pemilu 2004 adalah yang lolos dalam aturan *electoral treshold* atau jumah suara minimal 2% dalam pemilu 1999

Jurnal

Subiyantoro, Eko Bambang, 2004. Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Masih Menjadi Kabar Burung, Jakarta Yayasan Jurnal Perempuan.

Wijaksana, MB. 2004. Perempuan dan Politik Ketika yang Personal Adalah Konstitusional, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Huda, Qamarul, 2007. Status Perempuan Dalam Perspektif Islam (Antara Normatif dan Realitas), Tulungagung: AHKAM Jurnal Hukum Islam, LP3M Unit Penerbit STAIN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan KPU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan No. 10 Tahun 2009 mengenai Tahapan Pemilihan Umum.

Browsing

http://mojokertokab.go.id/PEREKONOMIAN/site/index.php/data-kependudukan. (20 Februari 2010).

http://www.mojokertokab.go.id (20 Februari 2010).

Ivan Afriani HS, "Metode Penelitian Kualitatif", http://www.penalaran-unm.org (10 Agustus 2010)

Jalali, Nazia, Peran Wanita di Dunia Politik, http://www.al-ibrah.com/peran-wanita-di-dunia-politik.htm. (20 Februari 2010).

Partisipasi *Politik Di Indonesia Suatu Tinjauan Dari Teori Elit,* http://gshk.blogspot.com/2010/04/teori-elite.html. (19 Mei 2010).

Prapantja, Rakawi, trans. by Theodore Gauthier Pigeaud, *Java in the 14th Century, A Study in Cultural History: The Negara-Kertagama* by Pakawi Parakanca of Majapahit, 1365 AD (The Hague, Martinus Nijhoff, 1962), vol. 4, p. 29. 34; G.J. Resink, *Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory* (The Hague: W. van Hoeve, 1968), hal. 21. http://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit. (19 Mei 2010).

Supriyadi, Usup, http://anokjang.multiply.com/recipes/item/4/ pengertian _ dan_ perkembangan_teori_politik. (20 Februari 2010).

Wijaya, Arief D,"*in depth interview* - Sesi Metode Pengumpulan data", wordpress.com (?)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id